



Laporan Kinerja 2023

Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang



@balmonsfr_padang



Telepon
(0751) 8962111



email
tu.upt_padang@kominfo.go.id

Laporan Kinerja
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi : Makin digital Makin Maju

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitoring
Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang

Ringkasan Eksekutif

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	Realisasi (%)
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
	2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
	3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101,01%
	4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.53%
	5. Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%	100%	105,26%
	6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	84.17%	84.17%
	7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
	8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
	9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	486.67%	486.67%
	10. ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	950.00%	950.00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	Realisasi (%)
	11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87%	89,02%	102.32%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80%	100%	125%

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Padang diuraikan di bawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Terdapat 11 (Sebelas) indikator kinerja, yaitu :

1. **Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota**

Monitoring dilaksanakan dengan observasi sesuai dengan pita penugasan (Stasiun tetap dan Stasiun bergerak/ Perangkat jinjing), hasil monitor harus teridentifikasi dan target ISR harus dimonitor. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal SDPPI menargetkan sebesar 100% untuk monitoring penggunaan frekuensi radio di Sumatera Barat yang terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten.

Capaian pada tahun 2023, kabupaten/kota yang termonitor adalah sebanyak 7 kota dan 12 kabupaten sehingga capaian adalah sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100%.

2. **Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)**

Indikator ini menargetkan 100% target sampling ISR diperiksa yang diukur dari pemeriksaan stasiun radio dan monitoring perangkat telekomunikasi.

Capaian pada tahun 2023, target sampling ISR telah diperiksa 100% sehingga capaian adalah sebesar 100% dan persentase capaian juga sebesar 100%.

3. **Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

Indikator ini menargetkan 99% jumlah aduan gangguan tertangani. Pada tahun 2023 terdapat 3 aduan gangguan dan seluruhnya telah selesai ditangani sehingga capaian adalah sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 101.01%.

4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Penertiban merupakan tindakan yang diambil terhadap pelaku usaha dan atau pengguna yang melanggar aturan di bidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Target indikator ini adalah jumlah penertiban SFR dan alat/perangkat sebesar 93%. Pada tahun 2023 telah dilakukan Kegiatan Penertiban Nasional Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi sebanyak 5 kali. Dari kegiatan tersebut Capaian indikator ini adalah sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 107,53%.

5. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Sarana Pendukung SMFR meliputi perangkat yang digunakan untuk mendukung fungsi monitoring, pengukuran, identifikasi spektrum frekuensi radio yang dapat berdiri sendiri di luar perangkat utama. Indikator ini menargetkan 95% Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT berfungsi dengan baik. Capaian indikator ini adalah 100% dan persentase capaian sebesar 105,26%.

6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk peserta kegiatan ujian negara amatir radio berbasis CAT. Hal ini berarti sebesar 100% jumlah peserta UNAR yang ditargetkan harus terpenuhi. Balmon Padang menargetkan peserta UNAR regular sebanyak 120 peserta, dan terealisasi sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 101 peserta. Persentase capaian indikator peserta UNAR yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang Tahun Anggaran 2023 sebesar 84,17%. Persentase capaian tidak tercapai dikarenakan sedikitnya peserta yang mendaftar.

7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL

Pada tahun 2023, target nilai penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL ditetapkan sebesar 100. Realisasi pelaksanaan kegiatan penanganan piutang dan Koodinasi pelimpahan ke KPKNL sebesar 100%, sehingga capaian kinerja yang telah dicapai adalah sebesar 100%.

8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja sasaran kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survey kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2023. Balai Monitor SFR Kelas II Padang telah melaksanakan Sosialisasi Pelayanan Publik sebanyak 3 kali, dengan total peserta sebanyak 280 peserta dari 10 Kabupaten/Kota. Survey Kepuasan Masyarakat telah terlaksana 100% dengan nilai IKM=3,86, IIPP=9,32. Capaian kinerja sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang TA 2023 adalah 100%

9. Bimbingan Teknis SRC/LRC

Indikator kinerja sasaran kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LCR ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2023

dengan target peserta sebanyak 30 peserta. Kegiatan Bimtek SRC/LRC ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan komunikasi dan pemahaman kepada pengguna frekuensi khususnya nelayan , bagaimana pentingnya menggunakan perangkat radio yang memenuhi standar marine. Balai Monitor SFR Kelas II Padang telah melakukan Bimbingan teknis SRC/LRC sebanyak 3 kali dengan total peserta 146 orang, capaian indikator Bimtek SCR/LCR yang telah dicapai oleh Balmon SFR Kelas II Padang TA 2023 sebesar 486,67%.

10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk jumlah ISR Maritim-IKRAN. Hal ini berarti sebesar 100% jumlah ISR yang sudah ditargetkan harus terpenuhi. Balai Monitor SFR Kelas II Padang menargetkan jumlah ISR Maritim-IKRAN tahun 2023 sebanyak 10 dan terealisasi s.d Desember 2023 sebanyak 42. Persentase capaian indikator ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebesar 950%.

11. Verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code site)

Pada tahun 2023, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link dan Penyiaran. Kegiatan Verifikasi Koordinat tahun 2023 berhasil menyelesaikan target sebanyak 44% dari jumlah wilayah kerja dengan 7 Kabupaten/ Kota dari 19 Kabupaten/ Kota dengan capaian ISR sebanyak 4.196 dan 921 Site sehingga rata-rata koordinat site terverifikasi 100%. Sedangkan untuk data penyiaran telah selesai 100% dengan jumlah ISR sebanyak 88 ISR.

Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI

Nilai kinerja anggaran diberikan target sebesar 87 dan dihitung dari IKPA (40%) dan SMART (60%). Balai Monitor SFR Kelas II Padang berhasil mencapai target sebesar 89.02 sehingga persentase capaian sebesar 102.32%

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada tahun 2023 target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ditetapkan sebesar 80. Nilai capaian nilai kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA diperoleh dari beberapa indikator yang menjadi dasar pembobotan oleh Kementerian Keuangan. Adapun indikator yang menjadi dasar pembobotan tersebut adalah dari laporan Hasil Rekon Eksternal per bulannya, dan Hasil Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Tingkat Kementerian. Persentase capaian indikator nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA yang telah dicapai Oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang adalah sebesar 125%.



KATA PENGANTAR

Balai Monitoring
Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang

Kata Pengantar

M. HELMI, ST., MM
KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG



Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2023.

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2023, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2023, melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2020-2024 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2023. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Maret 2024

**Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang**



Tertanda
M. HELMI, ST., MM

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG	12
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	16
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
RPJMN INDUSTRI TIK 2020-2024	18
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOMINFO 2020-2024	18
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMINFO 2020-2024	19
SASARAN PROGRAM DITJEN SDPPI 2020-2024	22
PERJANJIAN KINERJA 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban Serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	28
SASARAN 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	78
KINERJA LAINNYA	85
PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN	85
KEUANGAN	86
PENGELOLAAN BMN	88
PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN UPT	92
BAB IV PENUTUP	
DOKUMENTASI KEGIATAN	97



BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Potensi Dan Permasalahan Strategis

Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang

11

Latar Belakang

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika, spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur. Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang Tahun 2023 disusun sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang atas pelaksanaan tugas dan kegiatan serta pengelolaan anggaran tahun 2023. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja masing-masing unit organisasi di lingkungan Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang.

Selain itu, Lakin merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penyelenggaraan Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Operasi Sumber Daya.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL SDPPI



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang terdiri dari:

1. Subbagian Umum

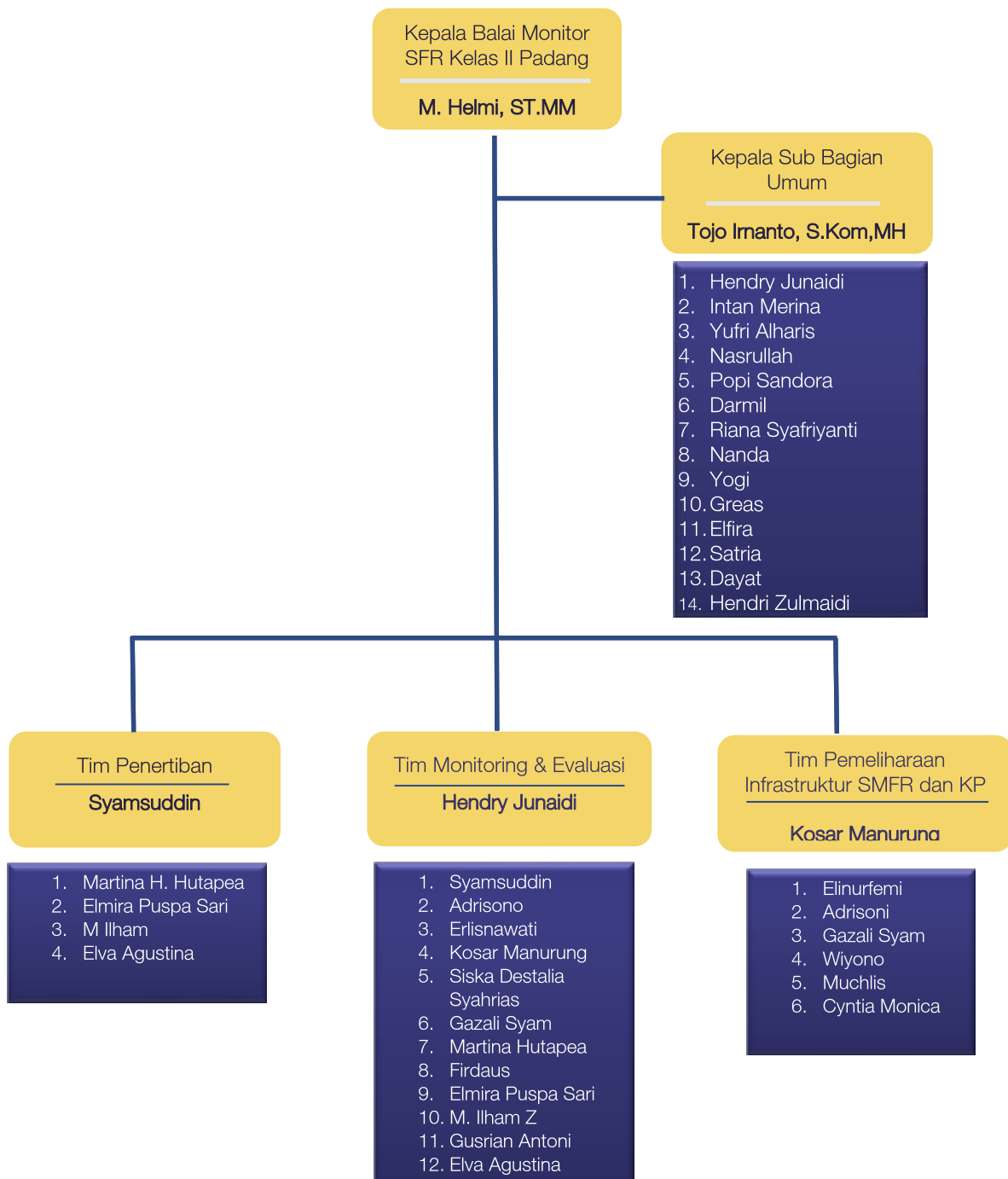
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



STRUKTUR ORGANISASI BALAI MONITOR SFR KELAS II PADANG



Potensi dan Permasalahan Strategis

Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 7 kota, terdiri dari 179 kecamatan, dengan luas wilayah Luas Provinsi Sumatera Barat 42.012,89 km² dan penduduk wilayah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5.534.472 jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpu pada 1 (satu) Kabupaten/Kota saja namun menyebar seperti pembangunan transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV Kabel yang tumbuh, dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR).

Balmon SFR Kelas II Padang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat pada Balmon SFR Kelas II Padang yang memiliki kompetensi tekniscukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (capacity building);
2. Regulasi penggunaan spektrum belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
3. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR);
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Balmon SFR Kelas II Padang;
5. Masih banyaknya peredaran dan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan standar teknis atau belum memiliki sertifikasi perangkat.



BAB II PERJANJIAN KINERJA

- A. RPJM Industri Tik Tahun 2020-2024
- B. Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024
- C. Sasaran Program Ditjen Sdppi 2020-2024
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang

RPJMN Industri TIK 2020-2024

Peran TIK sebagai mesin pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Pengembangan infrastruktur TIK harus dimajukan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, tujuan RPJMN 2020-2024 terkait bidang TIK adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dijabarkan dalam beberapa indikator dan target, sebagai berikut:

Sasaran RPJMN 2020-2024 Bidang TIK

No	Indikator Kinerja sasaran	Baseline 2019	Target 2024
a.	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (% total kecamatan)	35,71%	60%
b.	Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (% Desa)	87,4%	95%
c.	Populasi yang terlayani penyiaran digital (%)	52,28%	80%
d.	Fasilitasi <i>start up unicorn</i> baru (perusahaan)	5	8

Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020-2024

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Kominfo 2020-2024 dijelaskan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika tahun 2020-2024 antara lain:

- SS.01 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
- SS.02 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
- SS.03 Meningkatnya konektivitas layanan pos
- SS.04 Terwujudnya konektivitas Next Generation Nasional
- SS.05 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan informatika
- SS.06 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
- SS.07 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
- SS.08 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
- SS.09 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kominfo 2020-2024

Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat diuraikan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Kominfo

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target
SS.1 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau		
IKSS.1.1	Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (kumulatif)	3T : 9.113 Non 3T: 3.435
IKSS.1.2	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband*</i> (kumulatif)	60
IKSS.1.3	Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)	30
IKSS.1.4	Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA 1&2) (Gbps)*	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps - IP internet 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps
IKSS.1.5	Persentase (%) rasio harga layanan jaringan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*	0,25
IKSS.1.6	Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)*	7
SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital		
IKSS.2.1	Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	85
SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos		
IKSS.3.1	Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)	74
SS.4 Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation</i> Nasional		
IKSS.4.1	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	13
SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika		

IKSS.5.1	Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif) *	1310 MHz
IKSS.5.2	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	129 unit
IKSS.5.3	Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)	100
IKSS.5.4	Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika	34
IKSS.5.5	Jumlah capaian PNBPN bidang pos dan informatika	Rp. 116.713.620.006.888
IKSS.5.6	Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo	>3,5
SS.6 Meningkatkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis		
IKSS.6.1	Tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	100%
IKSS.6.2	Jumlah UMKM yang <i>scale up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)	33.000 UMKM scale up
IKSS.6.3	Jumlah Penambahan <i>unicorn</i> (kumulatif)*	3
IKSS.6.4	Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*	150 Startup aktif
IKSS.6.5	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	95
IKSS.6.6	Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)	90
IKSS.6.7	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	100
SS.7 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital		
IKSS.7.1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)*	50.000.000
IKSS.7.2	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	318.986 orang
SS.8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah		
IKSS.8.1	Jumlah Penyediaan Pusat Data Nasional	2

IKSS.8.2	Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif)	70
IKSS.8.3	Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi <i>Smart City</i> (kumulatif)	69
SS.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik		
IKSS.9.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	75
SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik		
IKSS.10.1	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)	3,8
IKSS.10.2	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo	84
IKSS.10.3	Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria (WDP/WTP)	WTP
IKSS.10.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo	75
IKSS.10.5	Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	90

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target
SS.5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	
1	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> (MHz)	1310 MHz
2	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)	129 Unit
3	Persentase pengembangan laboratorium sebagai pusat pengujian perangkat TIK	100%
4	Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi dan TIK	34 Standar Teknis
5	Jumlah target PNBPN bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	Rp. 94.346.347.054.000
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	>3,5

Sasaran Program Ditjen SDPPI 2020-2024

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Kominfo 2020-2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, sasaran program Ditjen SDPPI 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika

- SP.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP
- SP.2 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio
- SP.3 Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
- SP.4 Meningkatkan pengembangan ekosistem industri perangkat TIK

Program Dukungan Manajemen

- SP.1 Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen SDPPI

Program/Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program			Target
Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik			
SP. 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP		
	IKP. 1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	>3,5
	IKP. 1.5	Indeks integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	≥ 8,2
	IKP. 1.7	Jumlah target PNBP bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	Rp. 94.346.347.054.000
	IKP. 1.8	Pelayanan Publik Maritim Nelayan (<i>Maritim on the Spot</i>)	90%
SP. 2	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio		
	IKP. 2.1	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i>	1310 MHz

	IKP. 2.2	Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas <i>broadband</i>	8
	IKP. 2.3	Persentase Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk <i>public service</i> dan pemerintah	100
	IKP. 2.4	Jumlah masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital*	4
SP. 3	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik		
	IKP. 3.1	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	129 unit
	IKP. 3.2	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan	99
	IKP. 3.3	Persentase (%) layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100
SP. 4	Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK		
	IKP. 4.1	Persentase (%) pengembangan BBPPT sebagai laboratorium pusat pengujian perangkat TIK (kumulatif)	100
	IKP. 4.2	Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi	34 standar teknis
Program Dukungan Manajemen			
SP. 1	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien		
	IKP. 1.2	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo	84
	IKP. 1.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo	75
	IKP. 1.4	Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kemenkominfo menurut kriteria	WTP

	IKP. 1.5	Nilai SPIP Kemenkominfo	3,80
	IKP. 1.6	Nilai Kinerja Anggaran Kemenkominfo	88
	IKP. 1.7	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke sekretariat	3,8

PERJANJIAN KINERJA 2022

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang dapat disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
	2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
	3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101,01%
	4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.53%
	5. Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%	100%	105,26%
	6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	84.17%	84.17%
	7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
	8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	%
	9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	486.67%	486.67%
	10. ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	950.00%	950.00%
	11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87%	89,02%	102.32%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80%	100%	125%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.12.217.843.000,- yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni (RM).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang

Bab III

Akuntabilitas

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIN 2023 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Capaian Kinerja

Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%
	2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100%
	3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101,01%
	4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107.53%
	5. Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%	100%	105,26%
	6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	84.17%	84.17%
	7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%
	8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%
	9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	486.67%	486.67%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	%
	10. ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	950.00%	950.00%
	11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87%	89,02%	102.32%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80%	100%	125%

Sasaran 1

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Dalam rangka mewujudkan meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi telah dicapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota tercapai 100%;
2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) sebesar 100%;
3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 100%;
4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi sebesar 100%;
5. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT sebesar 100%;
6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT sebesar 84,17%;
7. Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL sebesar 100%;
8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 100%;
9. Bimbingan Teknis SRC/LRC sebesar 486,67%;
10. ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN sebesar 950%;
11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) sebesar 100%.

IKSK-1.1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kegiatan yang terdiri dari : 1) pengamatan kepadatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin, 2) mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang berizin dan tanpa izin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan okupansi di lapangan menggunakan perangkat SMFR tetap dan

transportable serta perangkat bergerak.

Monitoring pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk :

- Memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita subservice tertentu di wilayah Sumatera Barat;
- Mengetahui jumlah pengguna frekuensi yang sesuai dengan ketentuan pita frekuensi radio (IPFR) dan izin stasiun radio (ISR) yang telah ditetapkan di wilayah Sumatera Barat;
- Mengetahui perilaku pengguna frekuensi radio atas kesesuaian dengan ketentuan teknis yang berlaku yang telah ditetapkan dalam ISR di wilayah Sumatera Barat;
- Memonitor penggunaan frekuensi marabahaya, penerbangan, dan frekuensi penting lainnya di wilayah Sumatera Barat.

II. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2023, target Perjanjian Kinerja indikator ini adalah tercapainya 100% Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di 19 Kabupaten/Kota.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%	100%

Jumlah Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebagai berikut :

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah ISR Termonitor
1	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	7 Kegiatan
2	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	14 Kegiatan
3	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	1 Kegiatan

Realisasi Pencapaian Program Monitoring Spektrum Frekuensi Radio :

a. Dalam Kota

No.	Lokasi Monitoring	Pelaksanaan Kegiatan
1	Kota Padang	4 s.d 6 dan 9 s.d. 10 Januari 2023
2	Kota Padang	13 s.d. 17 Februari 2023
3	Kota Padang	17 s.d. 21 April 2023

No.	Lokasi Monitoring	Pelaksanaan Kegiatan
4	Kota Padang	24 s.d. 28 April 2023
5	Kota Padang	08 s.d. 12 Mei 2023
6	Kota Padang	22 s.d. 26 Desember 2023
7	Kota Padang	27 s.d. 31 Desember 2023

b. Luar Kota

No.	Lokasi Monitoring	Pelaksanaan Kegiatan
1	Kota Sawahlunto & Kab. Sijunjung	27 Februari s.d. 03 Maret 2023
2	Kab. Agam	20 s.d. 24 Februari 2023
3	Kota Solok & Kab. Solok	13 s.d. 17 Maret 2023
4	Kota Bukittinggi	27 s.d. 31 Maret 2023
5	Kota Padang Panjang & Kab. Tanah Datar	03 s.d. 07 April 2023
6	Kota Pariaman & Kab. Padang Pariaman	10 s.d. 14 April 2023
7	Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Agam & Kab. Tanah Datar	05 s.d. 09 Juni 2023
8	Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	03 s.d. 07 Juli 2023
9	Kab. Pesisir Selatan	31 Juli s.d. 4 Agustus 2023
10	Kab. Solok Selatan	07 s.d. 11 Agustus 2023
11	Kab. Dharmasraya	21 s.d. 25 Agustus 2023
12	Kab. Pasaman	09 s.d. 13 Oktober 2023
13	Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung	16 s.d. 20 Oktober 2023
14	Kota Padang Panjang & Kab. Tanah Datar	16 s.d. 20 Oktober 2023

c. Transportasi Laut

No.	Lokasi Monitoring	Pelaksanaan Kegiatan
1	Kab. Kepulauan Mentawai	13 s.d. 17 Februari 2023

Capaian okupansi kabupaten/kota perbulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Bulan	Jumlah Kabupaten/Kota Termonitor		Akumulasi Capaian (%)
		Akumulasi Okupansi	Kabupaten/Kota	
1	Januari	0		0
2	Februari	5	Kota Padang Kab. Agam Kab. Pasaman Barat Kab. Kep. Mentawai Kab. Sijunjung	26,32
3	Maret	10	Kota Sawahlunto Kota Bukittinggi Kab. Solok Kota Solok Kab. Padang Pariaman	52,63

No.	Bulan	Jumlah Kabupaten/Kota Termonitor		Akumulasi Capaian (%)
		Akumulasi Okupansi	Kabupaten/Kota	
4	April	13	Kab. Tanah Datar Kota Pariaman Kota Padang Panjang	68,42
5	Mei	13	-	68,42
6	Juni	13	-	68,42
7	Juli	15	Kota Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota	78,94
8	Agustus	18	Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Selatan Kab. Dharmasraya	94,73
9	September	18	-	94,73
10	Oktober	19	Kab. Pasaman	100
11	November	19	-	100
12	Desember	19	-	100

Indikator Kinerja Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/ kota memiliki target sebesar 80%. Pada tahun 2023, kegiatan monitoring frekuensi terlaksana di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Sumatera Barat. Persentase monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota sebesar 100%. Sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 125%. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota juga sebesar 100%.

Capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah ISR Termonitor	Jumlah ISR Teridentifikasi	Persentase ISR Teridentifikasi
1	KOTA PADANG	162	162	100%
2	AGAM	40	40	100%
3	PADANG PARIAMAN	35	35	100%
4	TANAH DATAR	15	15	100%
5	PESISIR SELATAN	17	17	100%
6	PASAMAN BARAT	17	17	100%
7	KOTA SAWAHLUNTO	20	20	100%
8	KEPULAUAN MENTAWAI	14	14	100%
9	DHARMASRAYA	13	13	100%
10	KOTA BUKITTINGGI	19	19	100%
11	LIMA PULUH KOTA	15	15	100%
12	KOTA PARIAMAN	12	12	100%
13	SOLOK	9	9	100%
14	SIJUNJUNG	9	9	100%
15	KOTA SOLOK	11	11	100%
16	KOTA PAYAKUMBUH	8	8	100%

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah ISR Termonitor	Jumlah ISR Teridentifikasi	Persentase ISR Teridentifikasi
17	PASAMAN	8	8	100%
18	SOLOK SELATAN	10	10	100%
19	KOTA PADANG PANJANG	9	9	100%
	Total	443	443	



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/ kota dapat tercapai sesuai target (100%) melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyiapkan program kerja dengan jadwal kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota sejumlah total 20 kegiatan pada seluruh kab/kota minimal 2 (dua) kegiatan monitoring di kabupaten/ kota dalam 1 (satu) bulan.
2. Mengoptimalkan minggu-minggu yang efektif dengan melaksanakan kegiatan secara maksimal.
3. Fokus pada pengambilan okupansi menggunakan perangkat SMFR sebanyak 18 subservis lengkap, monitoring target ISR Termonitor dan monitoring target ISR Teridentifikasi.
4. Manajemen sumber daya manusia khususnya Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dalam penugasan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/ kota.
5. Manajemen pelaporan rutin melalui aplikasi New ROL maksimal 7 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
6. Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, pendefinisian masalah dan pencarian solusi serta tindak lanjut dari solusi yang telah diterapkan.
7. Koordinasi rutin dan efektif dengan direktorat terkait.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaian kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota tercapai dengan persentase 125%, dengan perhitungan target sebesar 80% dan capaian sebesar

100%. Pada perjanjian kinerja Tahun 2023 terdapat kenaikan target menjadi 100% dan realisasi sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di dalam kota sebanyak 6 kegiatan, luar kota sebanyak 13 kegiatan dan transportasi laut sebanyak 1 kegiatan terjadi peningkatan target pada tahun 2023. Tahun 2023 ditargetkan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di dalam kota sebanyak 7 kegiatan, luar kota sebanyak 14 kegiatan dan transportasi laut sebanyak 1 kegiatan. Peningkatan target volume dari 20 kegiatan menjadi 22 kegiatan dan target capaian dari 80% menjadi 100%, indikator monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dapat tercapai dengan baik dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ini telah dilakukan tindak lanjut dari evaluasi tahun 2022, kemudian dilakukan beberapa pengembangan, yaitu melakukan kegiatan dengan fokus pada penyelesaian target yang telah diberikan oleh direktorat terkait kemudian memastikan hasil kegiatan terutama yang ditargetkan telah dilaporkan melalui aplikasi ROL. Tidak hanya selesai pada pelaporan ROL, selanjutnya juga dilakukan komunikasi rutin via daring melalui PIC pada direktorat terkait, untuk memastikan pelaporan melalui proses upload telah diterima dengan baik. Selain itu manajemen sumber daya juga telah dilakukan lebih baik daripada tahun sebelumnya, untuk memastikan personel tim dapat bekerjasama dalam mencapai target dalam setiap kegiatan dan menghasilkan output yang tepat sasaran yaitu pengambilan okupansi sebanyak 18 subservis, menyelesaikan target monitoring ISR yang termonitor dan menyelesaikan monitoring target ISR Teridentifikasi.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

1. Berorientasi Pelayanan, melalui monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dapat terlaksana pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan peruntukannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung perkembangan industri telekomunikasi;
2. Akuntabel, monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
3. Kompeten, Kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
4. Harmonis, kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama;
5. Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan;
6. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
7. Kolaboratif, pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dilakukan

kolaborasi baik internal Balmon SFR Kelas II Padang maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio.

VII. Efisiensi

Pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota terdapat pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 386.575.000,- untuk 7 kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota, 14 kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota dan 1 kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika transportasi laut. Namun karena terdapat efisiensi terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 348.055.000,- untuk 7 kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota, 14 kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota dan 1 kegiatan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika transportasi laut.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	Rp.348.055.000,-	Rp. 347.526.600,- (99,84%)	Rp. 528.400,-

IKSK-1.2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang sebagai salah satu UPT Ditjen SDPPI mempunyai tugas pokok dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Sumatera Barat. Salah satu kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan adalah kegiatan validasi data pengguna frekuensi radio yang merupakan upaya untuk pembuktian bahwa penggunaan frekuensi radio oleh pengguna frekuensi radio telah memiliki izin dan atau telah digunakan sesuai dengan izin yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan dengan inspeksi atau pemeriksaan langsung ke lokasi stasiun radio dan monitoring perangkat telekomunikasi.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator ini menargetkan 100% target sampling ISR diperiksa yang diukur dari pemeriksaan stasiun radio dan monitoring perangkat telekomunikasi.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	100%	100,00%

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Balai Monitor SFR Kelas II Padang sebagai berikut :

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah ISR Termonitor
1	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota	7 Kegiatan
2	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota	12 Kegiatan
3	Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio Transportasi Laut	1 Kegiatan

Realisasi pencapaian kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) :

a. Dalam Kota

No.	Lokasi	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kota Padang	Inspeksi dalam rangka Validasi ISR MW Link PT. Indosat Hutchison (Indosat & H3I) & PT. Smart Telecommunication	06 s.d. 10 Februari 2023
2	Kota Padang	Inspeksi dalam rangka Validasi ISR MW Link PT. Telkom, PT. Telkomsel & PT. XL Axiata	06 s.d. 10 Februari 2023
3	Kota Padang	Inspeksi dalam rangka Validasi ISR MW Link PT. Telkom, PT. Telkomsel & PT. XL Axiata	05 s.d. 09 Juni 2023
4	Kota Padang	Inspeksi dalam rangka Validasi ISR MW Link PT. IOH & Smart Telecom	05 s.d. 09 Juni 2023
5	Kota Padang	Inspeksi Pengguna Frekuensi Radio	04 s.d. 08 September 2023
6	Kota Padang	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Indosat Hutchison Ooredoo	16 s.d. 20 Oktober 2023
7	Kota Padang	Inspeksi Pengguna Frekuensi Radio BWA (2,4 GHz dan 5,8 GHz) dan Komrad	04 s.d. 08 Desember 2023

a. Luar Kota

No.	Lokasi	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kota Sawahlunto & Kab. Sijunjung	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Indosat, PT. Telkom & PT. Telkomsel	12 s.d. 16 Juni 2023
2	Kota Bukittinggi	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Smart Telecommunication, PT. XL Axiata	12 s.d. 16 Juni 2023

No.	Lokasi	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
3	Kab. Pasaman & Kab. Pasaman Barat	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Indosat	10 s.d. 14 Juli 2023
4	Kab. Pesisir Selatan	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Telkomsel	10 s.d. 14 Juli 2023
5	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang & Kab. Tanah Datar	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. XL Axiata	10 s.d. 14 Juli 2023
6	Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota & Kab. Agam	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. XL Axiata	28 Agustus s.d. 01 September 2023
7	Kab. Solok, Kab. Solok Selatan & Kab. Dharmasraya	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Telkom & PT. Telkomsel	28 Agustus s.d. 01 September 2023
8	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Indosat Hutchison Ooredoo	02 s.d. 06 Oktober 2023
9	Kota Payakumbuh, Kab. Limapuluh Kota dan Kab. Agam	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Telkom dan PT. Telkomsel	02 s.d. 06 Oktober 2023
10	Kab. Tanah Datar	Inspeksi Pengguna Frekuensi Radio dalam rangka Penanganan Gangguan Frekuensi Uplink LTE 900 Milik PT. Telkomsel	23 s.d. 27 Oktober 2023
11	Kota Payakumbuh dan Kab. Limapuluh Kota	Inspeksi Pengguna Frekuensi Radio BWA (2,4 GHz dan 5,8 GHz)	30 Oktober s.d. 3 November 2023
12	Kab. Pasaman Barat dan Kab. Dharmasraya	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Telkom dan P. Telkomsel	20 s.d. 24 November 2023

c. Transportasi Laut

No.	Lokasi	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kab. Kep. Mentawai	Inspeksi dalam rangka Validasi Data ISR MW Link PT. Telkom & PT. Telkomsel	12 s.d. 16 Juni 2023

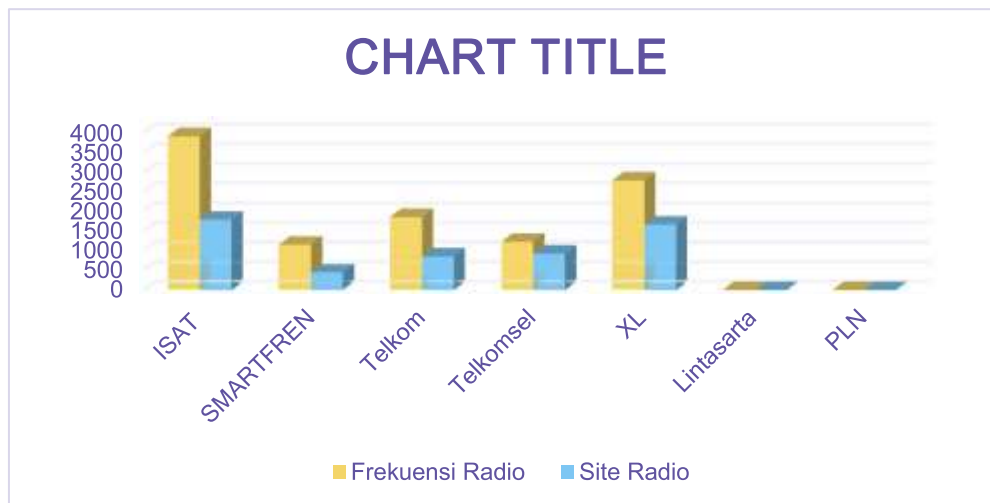
Rincian hasil kegiatan inspeksi stasiun radio MW link dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Nama Pemegang ISR	Data Sampling	Hasil Inspeksi			Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Tindak Lanjut Hasil Inspeksi		Capaian (% Valid)
			Sesuai ISR	Tidak Ada ISR	Tidak Sesuai ISR		Sudah Ditindak lanjuti	Belum Ditindak lanjuti	
1	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	388	117	22	2	247	271	0	100%
2	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER	395	189	6	0	200	206	0	100%
3	PT. INDOSAT TBK	225	211	0	0	14	14	0	100%
4	PT. SMARTFREN TELECOM	444	171	36	0	237	339	0	100%
5	PT. XL AXIATA	388	117	22	2	247	271	0	100%

Sebaran Frekuensi Radio dan Site MW Link di 19 Kabupaten Kota Sumatera Barat

Kab/Kota	XL		TSEL		TELKOM		SF		ISAT		PLN		LINTAS ARTA	
	ISR	SITE	ISR	SITE	ISR	SITE	ISR	SITE	ISR	SITE	ISR	SITE	ISR	SITE
Agam	187	182	144	114	173	83	172	77	478	180	2	1	-	-
Dharmasraya	143	66	82	49	183	67	-	-	212	80	-	-	1	1
Kep.Mentawai	4	4	8	6	52	8	-	-	2	4	-	-	-	-
Kota Bukittinggi	9	22	13	15	38	21	56	18	58	43	-	-	-	-
Kota Padang	287	353	92	75	88	61	281	118	912	519	-	-	-	-
Kota Padang Panjang	23	25	4	4	17	9	22	14	48	22	-	-	-	-
Kota Pariaman	61	45	12	14	32	13	49	23	85	43	-	-	-	-
Kota Payakumbuh	86	78	12	26	11	11	47	19	183	81	-	-	-	-
Kota Sawahlunto	30	27	21	14	30	21	52	20	94	28	-	-	-	-
Kota Solok	36	26	16	15	10	6	60	19	87	35	-	-	-	-
Lima Puluh Kota	192	125	68	68	4	68	20	14	209	108	-	-	-	-
Padang Pariaman	244	173	96	82	83	45	130	23	244	148	-	-	-	-
Pasaman	57	51	107	60	83	42	2	4	91	23	-	-	-	-
Pasaman Barat	246	112	135	76	299	86	140	52	329	102	-	-	-	-
Pesisir Selatan	224	120	109	94	261	101	4	4	275	116	-	-	-	-
Sijunjung	23	24	77	45	118	49	-	-	63	26	-	-	-	-
Solok	170	117	87	49	131	51	44	11	146	80	-	-	-	-
Solok Selatan	18	15	66	47	117	35	2	2	81	17	-	-	-	-
Tanah Datar	137	93	65	57	110	60	62	21	298	122	-	-	-	-

Grafik Sebaran Frekuensi Radio dan Site Radio MW Link Operator Seluler di Sumatera Barat



Indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) memiliki target sebesar 100%. Pada tahun 2023, kegiatan tersebut telah terlaksana sebanyak 100%. Sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Persentase (%) pengukuran stasiun radio dapat mencapai target (100%) melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyiapkan program kerja dengan jadwal kegiatan pemeriksaan stasiun radio yang terdiri dari Pengukuran Stasiun Radio Microwave Link dan Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Radio Siaran (TV Digital dan Radio FM), sejumlah total 21 kegiatan pada seluruh Operator Seluler untuk MW Link dan seluruh kabupaten/ kota untuk Radio Siaran, sebanyak minimal 2 (dua) kegiatan pemeriksaan stasiun radio dalam 1 (satu) bulan.
2. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio difokuskan pada target MW Link Remote Site dan Open Shelter dan pada Stasiun Radio Siaran FM dan seluruh Stasiun TV Digital yang ditargetkan.
3. Manajemen jadwal kegiatan dan sumber daya manusia khususnya Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi

Radio dalam penugasan kegiatan pemeriksaan stasiun radio. Jumlah kegiatan yang terbatas diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan target MW Link dan stasiun radio dan tv siaran dan sumber daya manusia yang ada sehingga tercapai pemeriksaan pada 100% target stasiun radio.

4. Melakukan inventarisasi penggunaan frekuensi radio yang menjadi target kegiatan pengukuran maupun inspeksi, untuk diketahui sebaran lokasi penggunaannya dimasing-masing wilayah kabupaten/kota sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
5. Manajemen pelaporan rutin melalui aplikasi APSTARD maksimal 7 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
6. Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, pendefinisian masalah dan pencarian solusi serta tindak lanjut dari solusi yang telah diterapkan. Koordinasi rutin dan efektif dengan direktorat terkait.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaian pemeriksaan stasiun radio tercapai 100%, melampaui target yang hanya 90% untuk Inspeksi Stasiun Radio dan 50% untuk pengukuran stasiun radio dan tv siaran. Pada 2023 ini hasil yang dicapai mengalami peningkatan karena target yang harus dicapai pada 2023 juga meningkat, target capaian untuk Inspeksi stasiun radio pada 2023 atau yang disebut saat ini adalah target pemeriksaan stasiun radio Microwave Link adalah 100% dan target pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun radio FM adalah 40% serta untuk TV siaran adalah 100%. Untuk seluruh target pemeriksaan stasiun radio pada 2023 seluruhnya telah tercapai 100% melampaui target.

Inovasi yang dilakukan untuk pencapaian tersebut adalah karena pada tahun 2023 ini telah dilakukan tindak lanjut dari evaluasi tahun 2021, kemudian dilakukan beberapa pengembangan, yaitu melakukan kegiatan dengan fokus pada penyelesaian target yang telah diberikan oleh direktorat terkait kemudian memastikan hasil kegiatan terutama yang ditargetkan pada pemeriksaan stasiun radio, telah dilaporkan melalui aplikasi APSTARD. Tidak hanya diselesaikan pada pelaporan APSTARD, selanjutnya juga dilakukan komunikasi rutin via daring melalui PIC pada direktorat terkait, untuk memastikan pelaporan melalui proses upload telah diterima dengan baik. Selain itu manajemen sumber daya juga telah dilakukan lebih baik daripada tahun sebelumnya, untuk memastikan personel tim dapat bekerjasama dalam mencapai target dalam setiap kegiatan dan menghasilkan output yang tepat sasaran yaitu pemeriksaan stasiun radio MW Link Open Shelter sejumlah 842 link dan Remote Site sebanyak 4937 link dan pengukuran parameter teknis pada Radio FM sebanyak 74 penyelenggara dan TV Digital sebanyak 12 penyelenggara. Khusus untuk pemeriksaan MW Link secara remote site ditemui kendala-kendala seperti stasiun yang tidak bisa di remote, stasiun yang sangat jauh dari pusat kota, dan lain-lain, ini telah dilakukan inovasi melalui pemeriksaan secara daring menggunakan whatsapp, video call, dan zoom. Sehingga keseluruhan data dapat diperiksa secara real time.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) pada tahun 2023 telah

mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

1. Berorientasi Pelayanan, melalui pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dapat terlaksana pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan peruntukannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung perkembangan industri telekomunikasi;
2. Akuntabel, pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
3. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
4. Harmonis, kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama;
5. Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang berkomitmen dalam mewujudkan tercapainya target yang telah ditetapkan;
6. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
7. Kolaboratif, pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dilakukan kolaborasi baik internal Balmon SFR Kelas II Padang maupun eksternal seperti koordinasi dengan instansi pusat, instansi daerah, dan stakeholder pengguna frekuensi radio.

VII. Efisiensi

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 341.250.000,- untuk 7 kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio dalam kota, 12 kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota dan 1 kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio transportasi laut. Namun karena terdapat efisiensi terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 313.350.000,- untuk 7 kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio dalam kota, 12 kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota dan 1 kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio transportasi laut.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukura, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pemeriksaan stasiun radio (inspeksi)	Rp. 313.350.000,-	Rp. 312.893.300,- (99,85%)	Rp. 456.700,-

IKSK-1.3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padatnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan atau yang dikenal dengan harmful interference. Akibat maraknya penggunaan spektrum frekuensi oleh masyarakat tanpa dan/atau tidak sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio, oleh karena itu dibutuhkan adanya proses pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang handal agar tidak terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan proteksi atau perlindungan bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Proteksi atau perlindungan tersebut dilakukan melalui kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dan wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (harmful interference). Penanganan gangguan spektrum frekuensi tersebut wajib mengutamakan penanganan pada dinas keselamatan seperti pada dinas penerbangan, dinas maritim dan dinas lainnya yang sangat berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Gangguan spektrum frekuensi radio ini perlu mendapat perhatian khusus oleh karena dalam penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI yang tersebar di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak terbatas pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, melainkan seluruh dinas atau service seperti pada dinas bergerak darat, tetap, siaran, satelit dan dinas lainnya. Pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sangat bergantung pada perangkat monitoring dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam melaksanakan penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Tahapan kegiatan penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi radio adalah :

- d. Menerima laporan aduan gangguan;
- e. Menganalisa laporan pengaduan gangguan;
- f. Melakukan observasi dan monitoring di lokasi yang terdeteksi gangguan;
- g. Mengidentifikasi sumber gangguan frekuensi;
- h. Melaporkan hasil penanganan gangguan;
- i. Menginformasikan kepada pelapor terkait hasil penanganan gangguan.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio antara lain mewujudkan adanya penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio secara responsif, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan layanan publik yang prima terhadap setiap aduan gangguan yang dilaporkan oleh masyarakat. Pada tahun 2023 ditargetkan 99% jumlah aduan gangguan tertangani.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%	100%	101.01%

Data penanganan gangguan spektrum frekuensi radio adalah sebagai berikut :

No	Nomor Pengaduan	Tanggal		Frekuensi Terganggu (MHz)	Pihak Terganggu	Pihak Pengganggu	Status
		Awal	Selesai				
1	33/LO-BOD/ST/MF/REG/V/2023	22/5/2023	25/5/2023	2300	PT. Smart Telecom	Penyedia jasa internet frek. 2,4 GHz	Clear
2	49/LO-BOD/ST/MF/REG/V/2023	05/6/2023	05/6/2023	2300	PT. Smart Telecom	Penyedia jasa internet frek. 2,4 GHz	Clear
3	Nodin Ka. Balmon Jakarta No. 777/Balmon.31/SP.03.03/07/2023	24/7/2023	28/7/2023	11309 KHz	Frekuensi Radio Band HF	KM Doa Ibu Dua	Clear
4	87/LO-BOD/ST/MF/REG/VIII/2023	16/8/2023	1/9/2023	TX: 10715 RX: 11245	PT. Smart Telecom	Internal	Clear
5	003.01.0301.0823	30/8/2023	8/9/2023	142.600	RAPI Padang	Toko Bangunan YD	Clear
6	36/TC.01/KU-05/IX/2023	04/9/2023	8/9/2023	LTE 900	PT. Telkomsel	PT. Smart Telecom	Clear

Indikator kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio memiliki target sebesar 99%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian indikator pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 101.01%.



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Tahun ini Balmon SFR Kelas II Padang berhasil menyelesaikan target indikator Persentase Penanganan Gangguan Frekuensi Radio melebihi target. Aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2023 berjumlah 6 aduan gangguan SFR dan sudah tertangani seluruhnya. Sepanjang tahun 2023 penanganan gangguan SFR telah diselesaikan 100% dari target 99% penyelesaian penanganan.

Pendekatan utama keberhasilan capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu Pertama, tahapan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio itu sendiri, Kedua, melalui evaluasi kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan dan yang Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan khusus penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Capaian penanganan gangguan SFR terkait keselamatan bisa melebihi target yang telah ditetapkan, beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut yakni:

1. Memiliki target pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio prioritas seperti dinas keselamatan (dinas maritim dan penerbangan) dan pita 2.6 dan 5.8 GHz yang sering menimbulkan gangguan pada frekuensi BMKG.
2. Melakukan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun komunitas seperti APJII, Himpunan Nelayan, Orari dan Rapi, dan lainnya dan menghadirkan narasumber seperti BMKG sebagai pihak yang menyediakan informasi terkait prakiraan cuaca dimana informasi tersebut dimanfaatkan oleh airnav dan pihak maskapai penerbangan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.
3. Melakukan edukasi sekaligus penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan penertiban ini adalah bagian tindak lanjut proses edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar

tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun 2023, Direktorat Pengendalian SDPPI dan UPT Monitor SFR se-Indonesia melakukan kegiatan penertiban nasional dengan target operasi dinas maritim dan amatir yang pelaksanaannya juga melibatkan unsur dari TNI dan Polri.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan beberapa inovasi dan pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya yaitu penggunaan aplikasi pelaporan aduan gangguan yang disebut Aplikasi Trouble Ticket. Dengan menggunakan aplikasi Trouble Ticket pelaporan gangguan dapat diterima dengan lebih cepat sehingga mempercepat respon penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi.

Selain itu, inovasi lain dari tim adalah mempersingkat proses awal dari penanganan gangguan yaitu klarifikasi gangguan dan analisis suspect melalui wa group Tim Reaksi Cepat yang beranggotakan para fungsional Pengendali Frekuensi Radio, sehingga kapanpun dan dimanapun, anggota dapat mendiskusikan laporan gangguan yang diterima sampai pada tahap analisis suspect, kemudian ditentukan tim yang turun untuk inspeksi gangguan ke lapangan, dapat terdiri dari anggota tim yang sedang stanby di kantor, maupun yang sedang dilapangan, diprioritaskan dilakukan oleh anggota tim yang sedang dilapangan, dengan posisi lebih dekat ke suspect gangguan.

Dari hal-hal tersebut, maka laporan gangguan dapat ditangani lebih cepat sampai gangguan dinyatakan clear oleh pelapor.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

1. Berorientasi Pelayanan, layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang merupakan layanan publik, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat;
2. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
3. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
4. Harmonis, kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
5. Loyal, selalu siap 24 jam dalam menerima aduan gangguan yang terjadi dari masyarakat dan segera memberikan respon penanganan gangguan meskipun sumber gangguan berada di wilayah yang sulit dijangkau dan butuh waktu yang tidak sebentar dalam proses penanganannya hingga gangguan spektrum

frekuensi tersebut dapat teratasi dengan tuntas;

- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menyelesaikan permasalahan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio khususnya pada dinas maritim dan penerbangan, tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait tentunya permasalahan penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio akan sangat sulit diselesaikan.

VII. Efisiensi

Efisiensi capaian target pada indikator penanganan gangguan frekuensi radio untuk dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor antara lain Pertama, meningkatnya jumlah perangkat monitoring yang dimiliki Balmon SFR Kelas II Padang dan Kedua, peningkatan kompetensi fungsional pengendali frekuensi. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap efisien dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Selain kedua faktor tersebut, inovasi mengenai layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan secara berkesinambungan salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi trouble tiket layanan penanganan gangguan SFR. Dengan adanya aplikasi ini, tentunya pengguna spektrum frekuensi radio dapat melakukan laporan pengaduan kapanpun dan dimanapun apabila frekuensi yang digunakan mengalami gangguan yang merugikan (Harmful Interference).

Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 26.200.000,- untuk 1 kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota dan 1 kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota. Namun karena terdapat efisiensi terjadi revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 24.560.000,- untuk 1 kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota dan 1 kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penanganan gangguan frekuensi radio	Rp. 24.560.000,-	Rp. 24.212.400,- (98,58%)	Rp. 347.600,-

IKSK-1.4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi merupakan suatu upaya untuk melakukan penegakkan hukum di bidang spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Tindakan pengguna spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi ilegal dapat mengakibatkan terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) terhadap pengguna yang sudah memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR). Semakin meningkatnya jumlah penggunaan spektrum frekuensi radio semakin meningkat pula penggunaan spektrum frekuensi ilegal di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan spektrum frekuensi ilegal antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi membuka peluang bagi masyarakat untuk menggunakan spektrum frekuensi radio secara ilegal, selain itu banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penggunaan spektrum frekuensi yang berijin.

Pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi serentak secara nasional dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI yang tersebar di seluruh Indonesia. Tindakan lapangan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi ilegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana tindakan lapangan tersebut didahului dengan sanksi administrasi berupa pemberian surat teguran, denda dan penghentian operasional penggunaan spektrum frekuensi radio. Pengenaan tindakan administrative tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bertindak persuasive kepada masyarakat agar tertib dalam menggunakan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Namun dalam perkembangannya, pemerintah tidak hanya menerapkan sanksi administratif melainkan dapat melakukan tindakan represif berupa pengenaan sanksi pidana apabila pengguna spektrum frekuensi tidak dapat dibina dan tetap menggunakan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi ilegal.

Tujuan pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi serentak secara nasional pada tahun 2023 antara lain:

- Tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi di masyarakat;
- Mencegah terjadinya gangguan spektrum frekuensi (harmful interference) radio terhadap pengguna SFR yang telah berijin; dan
- Memberikan kesadaran hukum mengenai penggunaan spektrum frekuensi dan alat perangkat telekomunikasi.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat perangkat

telekomunikasi adalah tertibnya penggunaan spektrum rekuensi radio sesuai dengan data perijinan (ISR) dan sertifikat alat perangkat telekomunikasi. Indikator kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi memiliki target sebanyak 90%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%	107,53%

Kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan pada:

No.	Kabupaten / Kota	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, & Kab. Agam	Penertiban secara Serentak Nasional Tahap I Tahun 2023 pada Radio FM	22 s.d. 26 Mei 2023
2	Sumatera Barat	Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Serentak secara Nasional Tahap II Khusus Frekuensi MW Link Operator Seluler	24 s.d. 28 Juli 2023
3	Kota Padang	Penertiban SFR Alat & Perangkat Telekomunikasi secara Serentak Nasional Tahap III Tahun 2023	11 s.d. 15 September 2023
4	Sumatera Barat	Penertiban SFR Alat Perangkat Telekomunikasi Serentak secara Nasional Tahap IV TH 2023 (Frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz)	13 s.d 17 November 2023
5	Kota Padang	Penertiban SFR dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Dinas Bergerak Darat (Pengguna Frekuensi Radio Konsesi)	27 November s.d. 01 Desember 2023

Hasil dari penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Penertiban Nasional Tahap I

Sasaran penertiban ini adalah radio siaran FM. Pada Penertiban Nasional tahap I terdapat 2 temuan pelanggaran yaitu tidak sesuai parameter teknis. Untuk pelanggaran alat komunikasi yang digunakan berupa pemancar radio siaran FM tidak sesuai yang tertera dalam izin stasiun radio dan bandwidth melebihi ketentuan.

b. Penertiban Nasional Tahap II

Sasaran dari penertiban ini adalah penertiban Microwave Link dan atau Alat Perangkat Telekomunikasi PT. Indosat, PT. XL, PT. Telkom dan Telkomsel di Wilayah Sumatera Barat.

No	Operator	Disegel	Off	Surat Pernyataan	Disesuaikan
1	PT. Telkom	3	114	1	1
2	PT. Telkomsel	2	30	1	2
3	PT. Indosat Ooredoo Hutchison	0	67	4	3
4	PT.XL Axiata	9	181	5	4

c. Penertiban Nasional Tahap III

Sasaran dari penertiban ini adalah penertiban dinas amatir, dinas maritim, dinas bergerak darat (Konsesi). Pada penertiban frekuensi dinas amatir terdapat 1 pengguna radio amatir yang mempunyai callsign daerah lain namun tidak melapor ke ORDA Sumbar dan diberikan surat pernyataan. Pada penertiban dinas maritim terdapat 15 pengguna radio maritim yang ditertibkan oleh tim penertiban karena tidak memiliki IKRAN, dengan diberikan Surat Pernyataan. Pada penertiban dinas bergerak darat terdapat 11 pengguna radio konsesi yang ditertibkan karena tidak memiliki ISR dan terdapat 1 (satu) perangkat yang diamankan oleh tim penertiban.

d. Penertiban Nasional Tahap IV

Sasaran penertiban ini adalah pengguna pita frekuensi radio 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Terdapat 5 (lima) pengguna ISP dengan total 16 (enam belas) frekuensi radio pita 5,8 GHz yang ditertibkan karena menggunakan frekuensi yang tidak sesuai ketentuan izin kelas, dengan rincian 14 (empat belas) Frekuensi dilakukan penyegelan dan 2 (dua) Frekuensi diberikan surat teguran.

Pada Penertiban Pita Frekuensi dinas konsesi ditertibkan 3 pengguna frekuensi radio dengan jumlah 10 perangkat disegel.

Indikator Kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi memiliki target sebanyak 93%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 100%, sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 107,53%.



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Melakukan perencanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait
3. Kerjasama PPNS dengan Korwas PPNS selaku Pembina semakin baik

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 ini telah dilakukan beberapa inovasi dan pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya yaitu pelepasan segel dilakukan secara daring dalam hal mengoptimalkan pelayanan secara efektif dan efisiensi kepada stake holder dengan tidak mengurangi unsur-unsur dari ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023 juga terdapat penambahan volume kegiatan dari tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat 1 kali Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota sedangkan tahun 2023 menjadi 2 kali. Sedangkan untuk Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota dari 2 kegiatan menjadi 3 kegiatan. Hal ini karena ada beberapa wilayah yang menjadi sasaran tidak terakomodir dari 4 kegiatan Penertiban Nasional yang diwacanakan oleh Direktorat.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

1. Berorientasi Pelayanan, layanan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan layanan publik, untuk menjamin penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terganggu oleh penggunaan spektrum radio dan perangkat ilegal. Pelaku pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dilakukan pembinaan untuk mengurus perizinan baik Izin Stasiun Radio (ISR) dan/atau Sertifikat Alat Perangkat Telekomunikasi;
2. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
3. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
4. Harmonis, kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
5. Loyal, ditunjukkan dengan integritas ASN dalam melaksanakan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dengan menjaga nama baik Instansi dan Negara;
6. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan serta bertindak pro aktif terhadap

permasalahan lapangan dan dapat memberikan solusi bagi masyarakat;

7. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menyelesaikan permasalahan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

VII. Efisiensi

Kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 143.065.000,- untuk 2 kegiatan penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota dan 3 kegiatan penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota. Namun karena terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 120.133.000,- untuk 2 kegiatan penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota dan 3 kegiatan penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	Rp. 120.133.000 ,-	Rp. 117.147.500,- (97,51%)	Rp. 2.985.500 ,-

IKSK-1.5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio maka perlu untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung kegiatan monitoring/pengukuran agar tetap dalam kondisi baik dan terawat.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT adalah terpeliharanya dengan baik perangkat dan alat monitoring yang menjadi aset Balmon SFR Kelas II Padang. Indikator kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT memiliki target sebesar 95%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	95%	100%	105,26%

Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT di Balmon SFR Kelas II Padang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Kondisi			
		Aktif (unit)	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
1	Stasiun Bergerak Monitoring	2			2
2	Stasiun Tetap	1			1
3	Perangkat Transportable	2			2
4	Perangkat DF	4			4
5	Wideband Receiver	6			6
6	Peralatan Ukur dan Monitoring	5	1		6
7	Peralatan Pendukung Lainnya	29			29
8	Antena	22			22
9	Unit Transeiver	29	3		32

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mempunyai target kinerja menargetkan 95% berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat.

Dari data kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring di Balai Monitor SFR Kelas II Padang yang berlokasi di Kantor Balmon Padang, dan 2 Stasiun Transportable yang berlokasi di Kab. Pasaman Barat dan Kab. Padang dengan kondisi perangkat 95,10 % berfungsi dengan baik dari yang ditargetkan 95%. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT melebihi target. Persentase (%) berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT di Balmon SFR Kelas II Padang dapat tercapai melebihi target (105,26%) melalui strategi sebagai berikut :

1. Menyiapkan data perangkat utama maupun pendukung untuk kegiatan monitoring yang akan dilaksanakan

pada Balmon SFR Kelas II Padang.

2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan untuk semua perangkat monitor yang ada termasuk kalibrasi perangkat stasiun tetap monitoring (transportable) dan SPA (Spectrum Analyzer).
3. Manajemen sumber daya manusia khususnya untuk pemeliharaan dan perawatan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring, petugas pemeliharaan ditambahkan dari jabatan fungsional pengendali frekuensi radio yang awalnya hanya memiliki 1 (satu) petugas pelaksana kegiatan pemeliharaan.
4. Melakukan pelaporan rutin untuk pemeliharaan perangkat pendukung SMFR melalui aplikasi SMFR agar pemeliharaan lebih terkontrol dan terjaga.
5. Koordinasi rutin dan efektif dengan direktorat terkait pemeliharaan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur.
6. Evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemeliharaan perangkat pendukung SMFR telah tercapai dari yang ditargetkan 95%, dengan baik. Dengan demikian kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR melebihi target yaitu 105,26%.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT memiliki target sebesar 95%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerja ini adalah 100,11%.

Pada perjanjian kinerja tahun 2023 memiliki capaian kinerja sama dengan tahun 2022 yaitu 95%, sehingga persentase capaian kinerja tahun ini menjadi 105,26%. Terjadi peningkatan persentase capaian target.

Pada tahun 2023 ini juga terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam hal penganggaran untuk pemeliharaan perangkat monitoring jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan terdapat kegiatan relokasi stasiun mobile menjadi stasiun tetap dan perbaikan perangkat transportable.

Agar capaian kinerja meningkat ditahun berikutnya Balmon SFR Kelas II Padang mempunyai beberapa inovasi untuk kegiatan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur seperti Pelaporan pemeliharaan rutin menggunakan aplikasi SMFR untuk pemeliharaan perangkat SMFR sehingga pemeliharaan perangkat SMFR Bergerak lebih optimal, mengingat SMFR bergerak tersebut digunakan untuk operasional monitoring dan observasi serta penanganan gangguan setiap hari.

Tindak lanjut dan inovasi dari kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR akan dilakukan hal - hal sebagai berikut pada tahun berikutnya :

1. Menyusun standar pembagian tanggungjawab penanganan pemeliharaan dan perbaikan termasuk penginputan data pada aplikasi SMFR
2. Perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk menangani pemeliharaan dan perbaikan perangkat SMFR

3. Untuk perangkat Utama seperti SPA (Spectrume Analyzer), Receiver dan Field Streng Meter juga termasuk TV Analyzer telah dijadwalkan untuk kegiatan kalibrasi ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada tahun 2023
4. Tahun 2023 dijadwalkan untuk kalibrasi stasiun monitor SMFR bergerak DDF 205 akan dibuat system monitoring pelaporan pemeliharaan rutin, kerusakan serta penanganan gangguan secara online Prosentase berfungsinya perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio sepanjang tahun 2023.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

- a. Berorientasi Pelayanan, dengan berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dengan baik maka dapat mendukung layanan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat ;
- b. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- c. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- d. Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- e. Loyal, dalam bentuk menjaga sebaik-baiknya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur yang merupakan aset negara;
- f. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- g. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menjaga perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

VII. Efisiensi

Indikator berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor antara lain Pertama, meningkatnya jumlah perangkat monitoring yang dimiliki Balmon SFR Kelas II Padang dan Kedua, peningkatan kompetensi fungsional pengendali frekuensi dalam menggunakan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	Rp. 403,370,000 ,-	Rp. 403,168,450,- (99,95 %)	Rp. 201.550 ,-

IKSK-1.6. Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Salah satu fungsi pelayanan pada Balai Monitor SFR Kelas II Padang adalah pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) bagi anggota dan calon angota Organisasi Amatir Radio (ORARI) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan IAR maka paea pegiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Sistem pelaksanaan UNAR dimulai dengan proses pendaftaran yang dilakukan secara online sampai dengan pencetakan kartu ujian untuk peserta yang dapat dilakukan setelah melakukan proses pembayaran secara host-to-host melalui bank yang dipilih.

II. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya pelaksaan ujian negara amatir radio adalah terciptanya pengguna frekuensi radio yang tertib. Indikator kinerja persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT di Balai Monitor SFR Kelas II Padang memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatoir Radio berbasis CAT	100%	84,17%	84,17%

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) tahun 2023 terlaksana sebanyak 8 kali kegiatan yang terbagi dalam 2 kegiatan UNAR Non Reguler dan 6 kali UNAR Reguler.

NO	HARI / TANGGAL UJIAN	LOKASI UJIAN	JUMLAH PESERTA			KELULUSAN		
			YD	YC	YB	YD	YC	YB
1	25-02-2023	Balmon Padang	2	-	-	2	-	-
2	19-03-2023	Pasaman Barat	32	1	-	13	1	-
3	9-05-2023	Balmon Padang	1	-	-	1	-	-
4	18-07-2023	Kabupaten Agam	20	3	3	19	2	1
5	29-07-2023	Balmon Padang	2	-	1	2	-	1
6	26-10-2023	Balmon Padang	5	1	-	4	1	-
7	30-11-2023	Balmon Padang	22	-	-	18	-	-
8	21-12-2023	Balmon Padang	6	1	-	5	1	-



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang mempunyai target kinerja 100% untuk Persentase (%) peserta ujian negara amatir radio. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengguna amatir radio sudah memiliki Izin Amatir Radio (IAR). Pendaftaran peserta UNAR dilakukan secara online melalui website <https://iar-ikrap.postel.go.id/>, untuk para calon peserta juga telah di sediakan media pembelajaran dan tryout ujian secara online melalui website <https://seenow.postel.go.id/>.

Dari data jumlah peserta pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) tahun 2023 terlaksana sebanyak 8 kali kegiatan yang terbagi dalam 2 kegiatan UNAR Non Reguler dan 6 kali UNAR Reguler. Target peserta ujian negara amatir radio tahun 2023 adalah 120 peserta, yang mana Total Peserta dari Januari sampai dengan Desember 2023 adalah 101 peserta. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena telah berkurangnya minat Masyarakat untuk menjadi pemegang IAR dan menjadi anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dengan alasan uang iuran keanggotaan yang cukup memberatkan calon peserta, serta perkembangan teknologi telekomunikasi yang kian pesat telah menggerus pertumbuhan penggunaan radio.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT yang diselenggarakan oleh Balmon SFR Kelas II Padang tahun 2023 adalah 84,17%. Oleh karena itu Balai Monitor SFR Kelas II Padang menyusun strategi agar ditahun berikutnya kegiatan ini dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Tindak lanjut dan inovasi kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT akan dilakukan hal - hal sebagai berikut pada tahun berikutnya :

1. Melakukan sosialisasi dengan lebih luas ke seluruh pengguna frekuensi radio.
2. Manajemen sumber daya manusia khususnya dalam bidang pelayanan untuk dapat mensosialisasikan perihal Ujian Negara Amatir Radio setiap ada pelayanan.
3. Evaluasi terhadap kegiatan UNAR serta tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT tercapai 84,17%.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target persentase peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT di UPT pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

- a. Berorientasi Pelayanan, dengan memberikan fasilitas pelaksanaan ujian amatir radio bagi peminat frekuensi radio dengan baik sehingga dapat mendukung layanan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat ;
- b. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- c. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- d. Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- e. Loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan Instansi;
- f. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

- g. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) untuk menjaga perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

VII. Efisiensi

Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 128.478.000,- untuk 6 kegiatan Ujian Negara Amatir Radio dalam kota dan 3 kegiatan Ujian Negara Amatir Radio luar kota. Namun karena terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 84.328.000,- untuk untuk 6 kegiatan Ujian Negara Amatir Radio dalam kota dan 3 kegiatan Ujian Negara Amatir Radio luar kota.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	Rp. 84.328.000 ,-	Rp. 82.301.800 ,- (97,60 %)	Rp. 2.026.200 ,-

IKSK-1.7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi khususnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio maka Balai Monitor SFR Kelas II Padang telah melaksanakan pendistribusian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Teguran (ST) kepada seluruh klien yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Balmon SFR Kelas II Padang juga melakukan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP Frekuensi Radio berupa penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh KPKNL Padang dan KPKNL Bukittinggi.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%

Penyampaian SPP/IB BHP, STP & STT Dalam Rangka Pencegahan Piutang

BULAN	SPP / IB BHP	STP 1	STP 2	STP 3	ST4 - STT
Januari	7	2	4	0	0
Februari	11	0	1	2	0
Maret	10	1	0	1	0
April	9	2	1	0	1
Mei	16	0	1	1	1
Juni	18	2	0	1	1
Juli	23	2	1	0	1
Agustus	28	0	0	0	1
September	14	0	0	0	1
Oktober	28	6	0	0	1
November	14	3	1	0	0
Desember	10	2	1	0	0
Jumlah	188	20	10	4	7

Penyampaian SPP/IB BHP, ST dalam rangka pencegahan piutang dapat di laksanakan dengan baik dan dapat di koordinasikan kepada wajib bayar untuk dapat segera menyelesaikan kewajiban pelunasan BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo pembayaran.

Adapun jumlah Surat Tagihan dan Rincian Tagihan yang terbit selama tahun 2023 dan dapat di sampaikan berjumlah 229 SPP/IB BHP, STP.

No.	Wajib Bayar	Nama KPKNL	Nilai Penyerahan	Tahapan Pengurusan	Tahapan Pengurusan	Lunas	Angsuran	PSBDT	Sisa Piutang
1	CAHAYA BINTANG ANDALAS,PT	KPKNL Padang	3,063,368	Nov-12	PSBDT			3,063,368	3,063,368
2	TRIO UTAMA PARIAMAN, PT	KPKNL Padang	20,175,996	Nov-12	PSBDT			20,175,996	20,175,996
3	RADIO SUARA SUBUH, PT.	KPKNL Padang	4,534,151	Nov-12	PSBDT			4,534,151	4,534,151
4	AGROWIRATA MA, PT	KPKNL Padang	2,443,025	Mar-17	Penetapan Lunas	2,443,025			-
5	KOPERASI ANDALAS MADANI	KPKNL Padang	2,448,689	Mar-17	PSBDT			2,448,689	2,448,689
6	PUTRA DAERAH, PT	KPKNL Padang	2,410,177	Mar-17	PSBDT			2,410,177	2,410,177
7	SUMATERA SAFARI INDRA,PT.	KPKNL Padang	1,673,046	Mar-17	PSBDT			1,673,046	1,673,046
8	MULTI MUTICORPOR ATAMA (MMC), PT (CAB. PADANG)	KPKNL Padang	2,219,001	Mar-17	PSBDT			2,219,001	2,219,001
9	RADIO TASSA, PT	KPKNL Padang	6,149,732	Mar-17	PSBDT			6,149,732	6,149,732
10	KOPERASI SOPIR TAKSI (KOSTI) PADANG	KPKNL Padang	16,672,092	Mar-17	PSBDT		2,732,791	13,939,301	13,939,301
11	RADIO GAPILAR, PT	KPKNL Padang	2,121,830	Mar-17	PSBDT			2,121,830	2,121,830
12	PEMERINTAH KAB.PESISIR SELATAN(KANTOR INFORMASI,KOMUN&ARSIP)	KPKNL Padang	76,977,858	Mar-17	Penetapan Lunas	76,977,858			-

No.	Wajib Bayar	Nama KPNL	Nilai Penyerahan	Tahapan Pengurusan	Tahapan Pengurusan	Lunas	Angsuran	PSBDT	Sisa Piutang
13	SUNDAWA SENTANA,PT.	KPKNL Padang	2,544,832	Mar-17	PSBDT			2,544,832	2,544,832
14	JAMIKA RAYA, PT	KPKNL Padang	353,603	Mar-17	Penetapan Lunas	353,603			-
15	BUANA PERMAI WISATA, PT/TAXI	KPKNL Padang	28,689,078	Mar-17	PSBDT			28,689,078	28,689,078
16	CAHAYA BINTANG ANDALAS,PT	KPKNL Padang	1,597,602	Mar-17	PSBDT			1,597,602	1,597,602
17	TRIO UTAMA PARIAMAN, PT	KPKNL Padang	15,638,489	Mar-17	PSBDT			15,638,489	15,638,489
18	PERSADA KARUNIA ALAM,PT	KPKNL Padang	8,371,889	Mar-17	PSBDT			8,371,889	8,371,889
19	RADIO KARTIKA ANGKASA NIAGA, PT.	KPKNL Padang	10,477,771	Mar-17	PSBDT			10,477,771	10,477,771
20	RADIO SUARA SUBUH, PT.	KPKNL Padang	3,829,814	Mar-17	PSBDT			3,829,814	3,829,814
21	RADIO AWANG NUSANTARA FALANDMI KALABA, PT	KPKNL Padang	1,735,120	Mar-17	Penetapan Lunas	1,735,120			-
22	CV. MULTI CIPTA MANUNGAL	KPKNL Padang	768,060	Mar-17	PSBDT			768,060	768,060
23	LUSAKA PRIMA SWARA, PT	KPKNL Padang	1,720,534	Mar-17	PSBDT			1,720,534	1,720,534

No.	Wajib Bayar	Nama KPNL	Nilai Penyerahan	Tahapan Pengurusan	Tahapan Pengurusan	Lunas	Angsuran	PSBDT	Sisa Piutang
24	COCA COLA AMATIL INDONESIA BOTLING-CENTRAL SUMATERA	KPNL Padang	422,565	Apr-18	Penetapan Lunas	422,565			-
25	DHAVE MAKMUR BERJAYA, PT	KPNL Padang	150,460	Jun-18	Penetapan Lunas	150,460			-
26	JATIMAS DIAN KENCANA, PT	KPNL Padang	109.722	Jul-18	Penetapan Lunas	109.722			-
27	HOTEL FEMINA, PT	KPNL Padang	109.725	Oct-18	Penetapan Lunas	109.725			-
28	BUKITTINGGI TELEVISI SUKSES MANDIRI, PT.	KPNL Bukittin ggi	181,324,53 1	Mar-17	PSBDT			181,324,53 1	181,324,53 1
29	RADIO ASMI CIPTA PESONA, PT	KPNL Bukittin ggi	4,128,686	Mar-17	PSBDT			4,128,686	4,128,686
30	TRIARGA MEDIA TELEVISI, PT	KPNL Bukittin ggi	31,521,542	Mar-17	PSBDT			31,521,54 2	31,521,54 2
31	AGAM SUMBAR LESTARI,PT	KPNL Bukittin ggi	4,197,744	Mar-17	PSBDT			4,197,744	4,197,744
32	PATAX	KPNL Bukittin ggi	17,773,739	Mar-17	PSBDT			17,773,73 9	17,773,73 9
33	BPR ANDALAS BARUH BUKIT	KPNL Bukittin ggi	460.453	Mar-17	Penetapan lunas	04 April 1901			-
34	PT. Radio Lintas Triarga Angkasa	KPNL Bukittin ggi	1,695,309	Mar-17	PSBDT			1,695,309	1,695,309
35	RADIO MAHKOTA GITA SWARA FM, PT.	KPNL Padang	2,251,421	April 2019	Penetapan Lunas	2,251,421			-

No.	Wajib Bayar	Nama KPNL	Nilai Penyerahan	Tahapan Pengurusan	Tahapan Pengurusan	Lunas	Angsuran	PSBDT	Sisa Piutang
36	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS	KPNL Padang	164,589	Agustus 2019	Penetapan Lunas	164,589			-
37	GRAHA SARANA DUTA, PT	KPNL Padang	109,725	November 2019	Penetapan Lunas	109,725			-
38	LIMAS HOTEL ,CV	KPNL Bukittinggi	367,812	20 Januari 2020	Penetapan lunas	367,812			-
39	RADIO FAVORIT SUARA SEMESETA , PT	KPNL Padang	2,194,299	20 Januari 2020	PSBDT			2,194,299	2,194,299
40	KOPERASI SOPIR TAKSI (KOSTI) PADANG	KPNL Padang	5,909,911	22 Januari 2020	PSBDT			5,909,911	5,909,911
41	KEMENDAGRI RI PUSDIKLAT REGIONAL BKT	KPNL Bukittinggi	244,061	10 Februari 2020	Penetapan lunas	244,061			-
42	BPBD KOTA PADANG	KPNL Padang	4,872,499	11 Mei 2020	Penetapan lunas	4,872,499			-
43	BPBD KAB PADANG PARIAMAN	KPNL Padang	3,588,968	11 Mei 2020	Penetapan lunas	3,588,968			-
44	RADIO PALITO SWARA SAHATI,PT	KPNL Bukittinggi	1,539,104	11 Mei 2020	Penetapan lunas	1,539,104			-
45	PT. BUANA LESTARI NUSANTARA	KPNL Padang	73,151	4 Juni 2020	penetapan lunas	73,151			-
46	POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	KPNL Padang	292,597	12 Oktober 2020	Penetapan lunas	292,597			-

No.	Wajib Bayar	Nama KPKNL	Nilai Penyerahan	Tahapan Pengurusan	Tahapan Pengurusan	Lunas	Angsuran	PSBDT	Sisa Piutang
47	AGROWIRATA MA, PT	KPKNL Padang	4,310,958	Januari 2013	penetapan lunas	4,310,958			-

Terdapat 20 klien dengan nilai pelunasan Rp. 99.898.196,- dan 27 klien dengan Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan nilai piutang Rp. 381.119.121,- Untuk Pendampingan yang dilaksanakan pada tahun 2023 berjumlah 4 Kegiatan dan dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan. Hal ini dikarenakan telah selesainya semua proses penanganan piutang oleh KPKNL Padang dan KPKNL Bukittinggi, Dimana status tahapan pengurusan piutang telah Penetapan Lunas dan PSBDT.

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL dapat mencapai target (100%) melalui strategi sebagai berikut :

Untuk kegiatan Penanganan piutang, Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP , Surat Informasi Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Surat Tagihan keterlambatan pembataran NHP dan Surat Teguran (ST) disampaikan secara online melalui WhatsApp ke PIC/Penanggunjawab dari Perusahaan/Lembaga Pemerintah pemegang ISR sehingga Tagihan dapat tersampaikan langsung. Untuk yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan teguran bulan ke 3 dilakukan kunjungan langsung ke Perusahaan/Lembaga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan penyampaian hal - hal yang timbul apabila piutang tidak segera dilunasi.

Sedangkan untuk kegiatan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL dapat terlaksana dengan baik dengan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan KPKNL dan rutin melakukan pendataan bersama kepada wajib bayar.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaian penanganan piutang dan koodinasi pelimpahan ke KPKNL tercapai 100% sesuai target. Pada 2023 ini hasil yang dicapai juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% .

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target persentase penanganan piutang dan koodinasi pelimpahan ke KPKNL tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut :

- Berorientasi Pelayanan, dengan memberikan fasilitas pelaksanaan ujian amatir radio bagi peminat frekuensi radio dengan baik sehingga dapat mendukung layanan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat ;
- Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;

- d. Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- e. Loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan Instansi;
- f. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- g. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) dalam penanganan piutang dan koodinasi pelimpahan ke KPKNL.

VII. Efisiensi

Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 112.582.000,- untuk 4 kegiatan Penanganan Tagihan dan Pelimpahan Piutang BHP luar kota, 3 kegiatan Klarifikasi Tunggakan BHP luar kota dan 2 kegiatan Klarifikasi Tunggakan BHP dalam kota. Namun karena terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 28.138.000,- untuk 2 kegiatan Penanganan Tagihan dan Pelimpahan Piutang BHP luar kota, 1 kegiatan Klarifikasi Tunggakan BHP luar kota dan 2 kegiatan Klarifikasi Tunggakan BHP dalam kota. Penurunan volume ini disebabkan sebagai berikut :

- a. kegiatan Penanganan Tagihan dan Pelimpahan Piutang telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan pada triwulan ke 2 tahun 2023 dalam 2 kali kegiatan, Dimana status tahapan pengurusan piutang telah Penetapan Lunas dan PSBDT, sehingga tidak diperlukan lagi adanya kegiatan Penanganan Tagihan dan Pelimpahan Piutang.
- b. kegiatan Klarifikasi Tunggakan BHP dilaksanakan apabila terdapat klien/Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran BHP sampai dengan bulan ke 3 keterlambatan, apabila klien/Wajib Bayar telah melakukan pembayaran tepat waktu atau sebelum bulan ke 3 keterlambatan, maka tidak di perlukan Klarifikasi tunggakan BHP

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (&) Penanganan Piutang dan Koodinasi Pelimpahan ke KPKNL	Rp. 28.138.000,-	Rp. 26.961.000,- (95,82%)	Rp. 1.177.000,-

IKSK-1.7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman peserta sosialisasi dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi radio yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%

Kegiatan Sosialisasi penggunaan frekuensi radio pada tahun 2023 di laksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Tanggal Sosialisasi	Lokasi Pelaksanaan	Tema	Keterangan
1	22 Juni 2023	Kota Padang	Apa dan Mengapa Frekuensi Radio? Urus Izinnya, Pakai sesuai peruntukannya ,Aman dan lancar komunikasinya	Di hadiri oleh 100 Peserta dari 10 Kab/Kota
2	21 September 2023	Kab. Agam	Komunikasi Internet Nyaman, Gunakan Frekuensi Radio Dan Perangkat Tertib Sesuai Ketentuan	Di hadiri oleh 90 Peserta dari 10 Kab/Kota
3	23 November 2023	Kota Bukittinggi	“Tertib Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Di Era Digitalisasi Informasi Dan Penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Bersertifikasi Guna Mendukung Frekuensi Satuan Negeri”	Di hadiri oleh 90 Peserta dari 10 Kab/Kota

Untuk survei kepuasan masyarakat hasilnya adalah sebagai berikut :



IPAK-IPKP

IPAK-IPKP	Kode	Kategori	Indeks
IPAK	K1	Diskriminasi Pelayanan	3.72
	K2	Pelayanan diluar prosedur	3.61
	K3	Penerimaan imbalan	3.80
	K4	Pungutan liar (pungli)	3.75
	K5	Percaloan/perantara tidak resmi	3.75
IPKP	P1	Persyaratan	3.88
	P2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.93
	P3	Waktu Penyelesaian	3.88
	P4	Biaya/Tarif	3.74
	P5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.79
	P6	Kompetensi Pelaksana	3.93
	P7	Perilaku Pelaksana	3.91
	P8	Sarana dan Prasarana	3.84
	P9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.86

IIPP-IKM

IIPP-IKM	Kode	Kategori	Indeks
IIPP	K1	Diskriminasi Pelayanan	9.30
	K2	Pelayanan diluar prosedur	9.03
	K3	Penerimaan imbalan	9.50
	K4	Pungutan liar (pungli)	9.38
	K5	Percaloan/perantara tidak resmi	9.38
IKM	P1	Persyaratan	3.88
	P2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.93
	P3	Waktu Penyelesaian	3.88
	P4	Biaya/Tarif	3.74
	P5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.79
	P6	Kompetensi Pelaksana	3.93
	P7	Perilaku Pelaksana	3.91
	P8	Sarana dan Prasarana	3.84
	P9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Mas...	3.86

Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Survey	Nilai Survey (Skala 4.0)	Nilai Survey (Skala 100)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,69	92,25

Hasil Penilaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)

No	Survey	Nilai Survey (Skala 4.0)	Nilai Survey (Skala 10)
1.	Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)	3,75	9,38



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dapat mencapai target (100%) melalui strategi sebagai berikut :

Balai Monitor SFR Kelas II Padang berupaya untuk lebih berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, dengan memperlakukan masyarakat pencari layanan sebagai pelanggan. Dengan demikian, apa yang menjadi kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat akan selalu diperhatikan. Terkait hal itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang. Dengan demikian harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir dalam proses pelayanan, sehingga terhadap unsur-unsur atau aspek yang masih dianggap kurang dapat dilakukan pembenahan. Tidak hanya itu, namun Balai Monitor SFR Kelas II Padang juga Meningkatkan koordinasi dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dan Instansi terkait dalam pemberian layanan perizinan dimana dapat memberikan pemahaman dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat komunikasi radio yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 menargetkan kegiatan sosialisasi sebanyak 3 kali dengan masing-masing kegiatan menargetkan

50 orang peserta. Pada tahun 2023 kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan masing-masing kegiatan menargetkan 60 orang peserta. Pada realisasinya peserta yang hadir jauh melebihi target yang ditetapkan, dimana terdapat total 280 peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Padang dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dapat menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan public serta Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public dengan langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar mereka memahami jika Balai Monitor SFR Kelas II Padang mempunyai Tugas untuk melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Sosialisasi sangat dibutuhkan masyarakat dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya sehingga masyarakat yang tadinya kurang terbuka akan informasi mengenai Balai Monitor SFR Kelas II Padang dan perizinannya menjadi lebih paham dan tidak terjadi kesalahan dalam mendaftarkan perizinan secara online yang seringkali menimbulkan persepsi perizinan itu rumit atau tidak mudah.

Dari segi materi yang disajikan pada tahun 2023 ini meliputi Sosialisasi pertama yaitu "Apa dan mengapa frekuensi radio??? Urus izinnya, pakai sesuai peruntukannya, aman dan lancer komunikasinya, Sosialisasi kedua yaitu Sosialisasi Aturan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas serta Dampak Negatif Penggunaan Izin Kelas yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Sosialisasi ketiga yaitu Sosialisasi Tertib Perizinan Spektrum Frekuensi Radio di Era Digitalisasi Informasi dan Penggunaan Perangkat Komunikasi Radio Bersertifikasi Guna Mendukung Frekuensi Satuan Negeri".

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut:

- Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat;
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;

- g. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.

VII. Efisiensi

Kegiatan Sosialisasi pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 157.866.000,- untuk 2 kegiatan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio yang dilaksanakan di luar kota dan 1 kali di dalam kota. Namun karena terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 158.852.000,- untuk untuk 3 kegiatan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio yang dilaksanakan di luar kota dan 1 kali di dalam kota.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Sosialisasi pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	Rp. 158.852.000 ,-	Rp. 158.008.000,- (99,47%)	Rp. 844.000,-

IKSK-1.9. Bimbingan Teknis SRC dan LRC

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (Global Maritime Distress and Safety System) yang selanjutnya disingkat GMDSS adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayanan global, baik antara stasiun kapal dengan stasiun kapal lain, antara stasiun kapal dengan stasiun pantai melalui penggunaan komunikasi radio terrestrial dan satelit. Tentunya dalam komunikasi diperlukan pengoperasian alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada stasiun radio dinas operasi Pelabuhan (port operations service), stasiun radio dinas bergerak maritim (maritime mobile service) dan stasiun radio dinas satelit bergerak maritim (maritime mobile satellite service) yang wajib dilaksanakan oleh Radio Elektronika dan/atau operator radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan atau Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi Solas. Sertifikat tersebut terdiri dari Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SRC) dan Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (LRC).

Untuk itu Dirjen SDPPI membuat program Sosialisasi dan atau Bimtek SRC/LRC Nelayan program MOTS untuk memberikan pemahaman kepada nelayan pentingnya memiliki ISR Maritim dan memudahkan nelayan untuk mendapatkan sertifikat ISR Maritim.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Bimbingan Teknis SRC/LRC memiliki target sebesar 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	486,67%	486,67%

Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek SRL/LRC telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu di Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 4 Mei 2023 , di Kab. Agam pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Sosialisasi dan Bimtek SRC/LRC di PPS Bungus Kota Padang pada tanggal 31 Oktober 2023. Peserta berhasil mendapatkan sebanyak 146 sertifikat dari target sebanyak 30 sertifikat.

No	Tgl Bimtek	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Sertifikat	Ket
1	4 Mei 2023	PPI Kambang Kab. Pesisir Selatan	53 LRC	
2	24 Agustus 2023	PPI Tiku Kab. Agam	51 SRC	
3	31 Oktober 2023	PPS Bungus Kota Padang	42 LRC	



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC dapat melebihi target (100%) melalui strategi sebagai berikut : Selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan instansi Kementerian Kelautan dan perikanan melalui Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi perikanan serta kepada para ketua-ketua persatuan nelayan yang ada di Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mengumpulkan para nelayan dan pemilik kapal untuk dapat diberikan sosialisasi dan bimtek terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan komunikasi keselamatan pelayaran.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaian Bimbingan Teknis SRC/LRC melampaui target sebesar 173,33%. Pada 2023 ini hasil yang dicapai juga jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 486,67%.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Bimbingan Teknis SRC/LRC tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut:

- Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat;
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat sehingga dapat melakukan evaluasi dari survey yang telah dilaksanakan.

VII. Efisiensi

Kegiatan Bimbingan Teknis SRC dan LRC pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 102.218.000,- untuk 2

kegiatan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio yang dilaksanakan di luar kota. Namun karena terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 118.004.000,- untuk untuk 2 kegiatan Sosialisasi Pengguna Frekuensi Radio yang dilaksanakan di luar kota dan 1 kegiatan di dalam kota.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Bimbingan Teknis SRC dan LRC	Rp. 118,004,000 ,-	Rp. 117.619.000,- (99,67%)	Rp. 385.000,-

IKSK-1.10. ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

ISR Maritim adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada pemilik kapal laut (ISR Kapal Laut). Kapal laut dalam kegiatan pelayaran menggunakan frekuensi radio baik di band HF maupun VF. Untuk meningkatkan keselamatan kapal laut dalam pelayarannya, maka penggunaan radio dan frekuensi yang tepat merupakan suatu keharusan. Program MOTS merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat untuk mendorong percepatan perizinan ISR Maritim yang wajib dimiliki oleh setiap kapal nelayan demi terwujudnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang aman, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN memiliki target 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	ISR Maritim Nelayanan program MOTS-IKRAN	100%	950%	950%

Tahun 2023, untuk kegiatan MOTS Balmon Padang di fokuskan untuk penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN). Dimana ditahun 2023 telah berhasil mendapatkan 95 IKRAN bagi Masyarakat Nelayan yang mempergunakan perangkat radio komunikasi HF .

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

ISR Maritim Nelayanan Program MOTS-IKRAN dapat mencapai target (950%). Kegiatan ini dapat terlaksana melebihi target tentunya karena Balmon Padang rutin untuk mengenalkan kepada nelayan mengenai program MOTS-IKRAN. Para nelayan dapat mengetahui dan memahami tatacara penggunaan frekuensi radio dan pengurusan ISR beserta sertifikasi perangkat telekomunikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para nelayan akan terbantu pada saat mendapat musibah di tengah laut dan terhindar dari sanksi hukum (administrasi maupun pidana penjara) karena melakukan kegiatan komunikasi yang menimbulkan gangguan dan kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan jiwa manusia, misalnya, yang dipicu penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara ilegal.

Ditahun 2023 Balmon Padang melaksanakan kegiatan IKRAN yaitu sebuah inovasi terbaru Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menyediakan solusi komunikasi radio khusus bagi nelayan diaman sejumlah nelayan, nahkoda kapal ikan dan pemilik kapal berhak mendapatkan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN).

IKRAN diberikan bagi peserta yang berhasil lulus dalam Bimbingan Teknis Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh (SJJJ) atau Long Range Certificate (LRC) dalam upaya mewujudkan Gerakan Nelayan Tertib Frekuensi.

Bimtek pada esensinya merupakan pembekalan kecakapan sebagai operator radio maritime, agar mampu mengoperasikan perangkat radio pada frekuensi kerja VHF, MF hingga HF dengan jangkauan hingga 150 nautical miles atau sekitar 300 km dari stasiun pantai terdekat. Hal ini sesuai ketentuan internasional, yakni ITU Radio Regulation sebagai bagian dari ekosistem keselamatan jiwa di laut. Diharapkan, setelah mengikuti bimtek, para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan frekuensi radio serta tata cara komunikasi sesuai kaidah dan ketentuan maritim.

Sedangkan IKRAN, sebagai inovasi terbaru Ditjen SDPPI, dimaksudkan sebagai solusi komunikasi radio khusus bagi pelaku pelayaran yang membutuhkan frekuensi HF khusus Non-GMDSS untuk komunikasi kapal ke kapal, kapal ke pemilik ikan, serta kapal ke stasiun pantai. IKRAN bisa dimiliki oleh nelayan, nahkoda, operator radio kapal, pemilik kapal, dan syahbandar atau petugas stasiun pantai.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Di tahun 2022 realisasi MOTS Balmon Padang mencapai target sebesar 520% dengan jumlah IKRAN sebanyak 52 IKRAN dan ditahun 2023 Balmon Padang melaksanakan kegiatan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN untuk masyarakat khususnya nelayan agar sadar dan tertib frekuensi. Ditahun 2023 juga ditiadakan petugas loket MOTS karena kegiatan ditahun 2023 dikhususkan untuk kegiatan MOTS IKRAN. Untuk realisasi pencapaian target sebesar 950% dengan 95 IKRAN.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN tahun 2023 telah

mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- c. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- d. Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- e. Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat;
- f. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- g. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

VII. Efisiensi

Kegiatan ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN pada awal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 102.732.000,-. Namun karena terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp. 51.050.000,-. Hal ini dikarenakan ditiadakannya petugas loket MOTS karena kegiatan di tahun 2023 di pusatkan untuk kegiatan IKRAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
Meningkatnya Layanan Monitoring,Pengukuran, Inspeksi, Penertiban sertaPelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	Rp. 51.050.000,-	Rp. 50.594.000,- (99,11%)	Rp. 456.000,-

IKSK-1.11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, diama setiap stasiun radio harus dapat dikenali dengan

tanda pengenal. Tanda pengenal untuk stasiun radio memuat keterangan nama pemegang izin atau nomor izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR ini merupakan bagian dari program Prima Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Direktorat Operasi Sumber Daya telah menambahkan indikator kinerja UPT Tahun 2024 terkait verifikasi data koordinat site ISR yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data koordinat stasiun radio yang tercantum dalam ISR dengan kondisi riil di lapangan. Output dari kegiatan ini selain pemutakhiran data koordinat pada SIMS juga tersedianya referensi site koordinat yang akan dijadikan acuan dalam permohonan ISR di lokasi eksisting.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) memiliki target 100%.

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%	100%

Kegiatan Verifikasi Koordinat Site tahun 2023 berhasil menyelesaikan target sebanyak 44% jumlah wilayah kerja dengan 7 Kabupaten Kota dari 19 Kabupaten Kota dengan capaian ISR sebanyak 4.196 dan 912 Site. Sedangkan untuk data penyiaran telah selesai 100% dengan jumlah ISR sebanyak 88 ISR.

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa metode seperti pemanfaatan peta online Google Maps dan stret view untuk memastikan ada site/tower BTS pada titik koordinat yang tertera pada data SIMS/ISR. Selain itu untuk data dukung berupa gambar/foto site di lokasi dilakukan pengambilan secara langsung untuk site/tower BTS yang tidak di jangkau oleh Google Stret View. Selain itu juga diperlukan koordinasi antar operator seluler yang memiliki izin MW Link pada site/tower BTS.

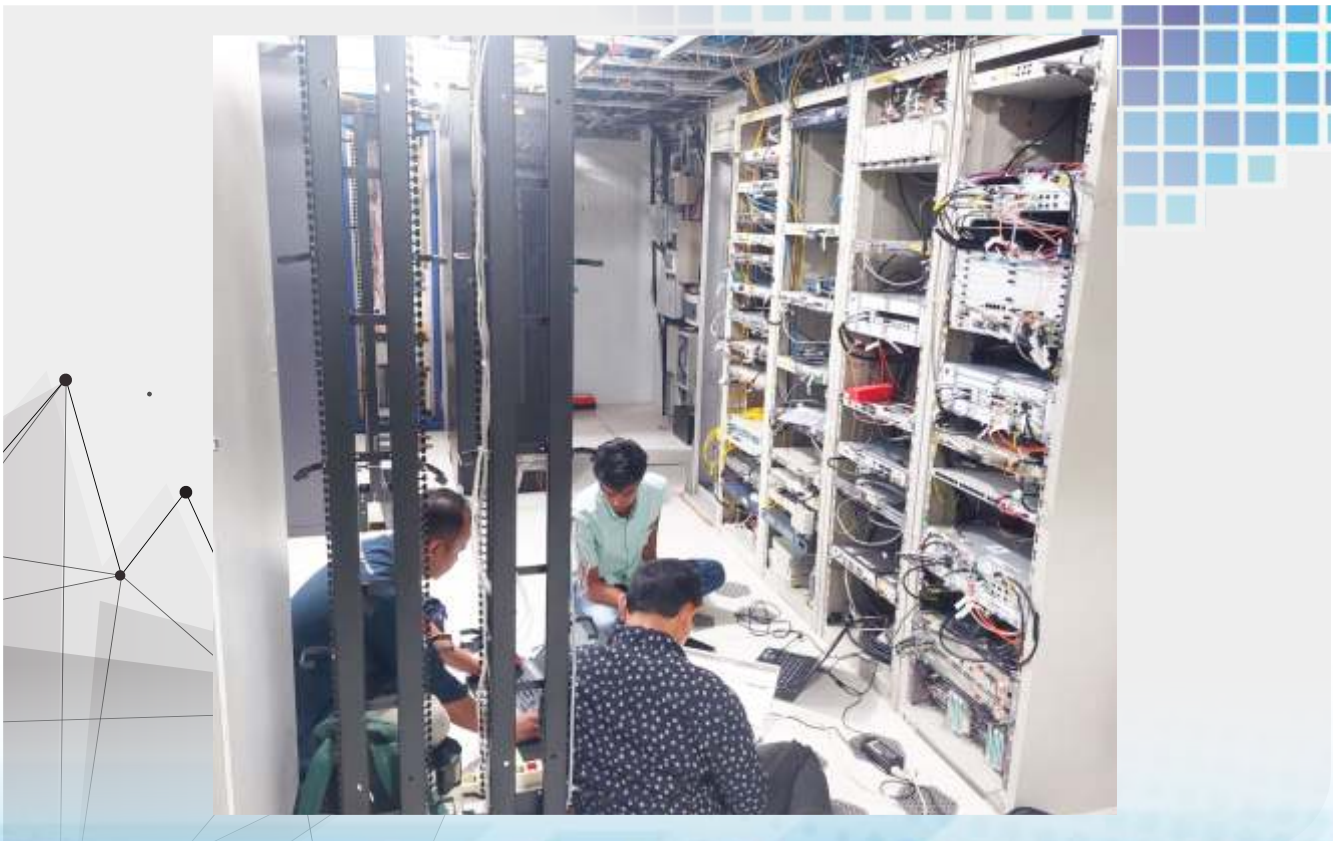
V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Kegiatan Verifikasi Koordinat Site baru dilaksanakan pada tahun 2023.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya Ber-AKHLAK sebagaimana berikut:

- Berorientasi Pelayanan, pelayanan yang diberikan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- Loyal, indikator kinerja ini didukung oleh tim kerja yang loyal dalam mewujudkan target pelayanan public yang baik kepada masyarakat;
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.



Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

IKSK-2.1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (spending better), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, mulai dari tahun 2023 diukur dari 3 (tiga) aspek yaitu :

Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)	Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
•Revisi DIPA (10%) •Deviasi Halaman III DIPA (10%)	•Penyerapan Anggaran (20%) •Data Kontrak (10%) •Penyelesaian Tagihan (10%) •Pengelolaan UP dan TUP (10%) •Dispensasi SPM (5%)	•Capaian Output (25%)

Tujuan IKPA adalah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI memiliki target sebesar 87. Nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai IKPA (omspan) 40% dan nilai SMART 60%.

III. Capaian Target

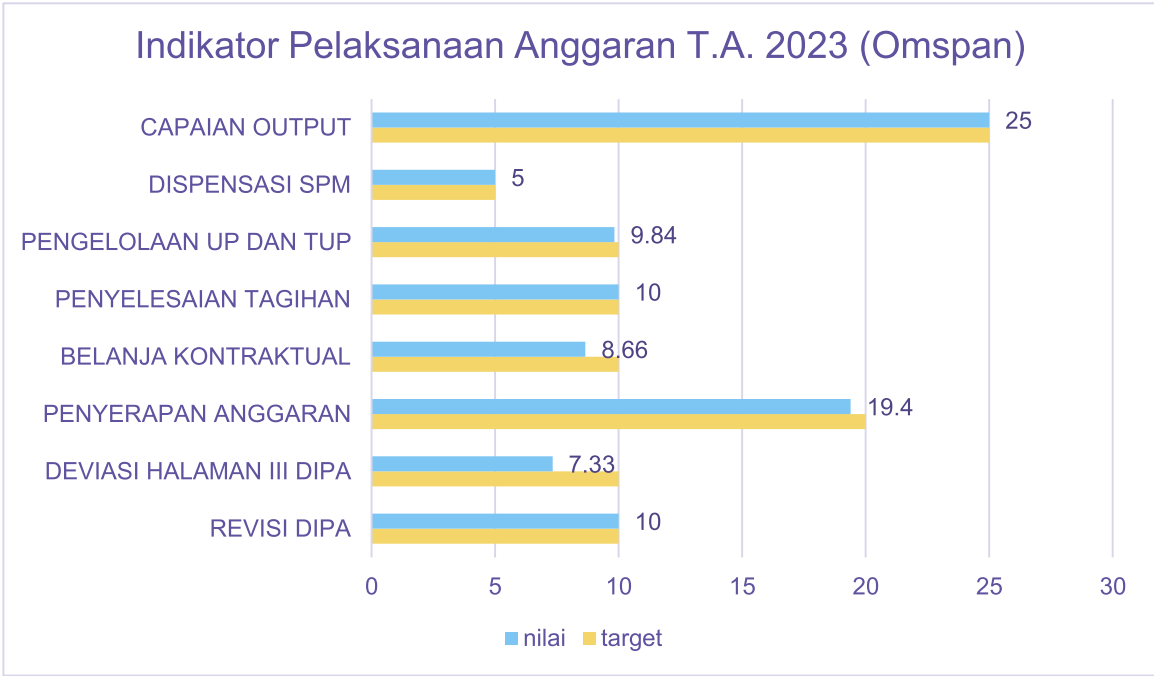
Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	87	89,02	102,32%

TARGET DAN CAPAIAN BULANAN NILAI KINERJA ANGGARAN

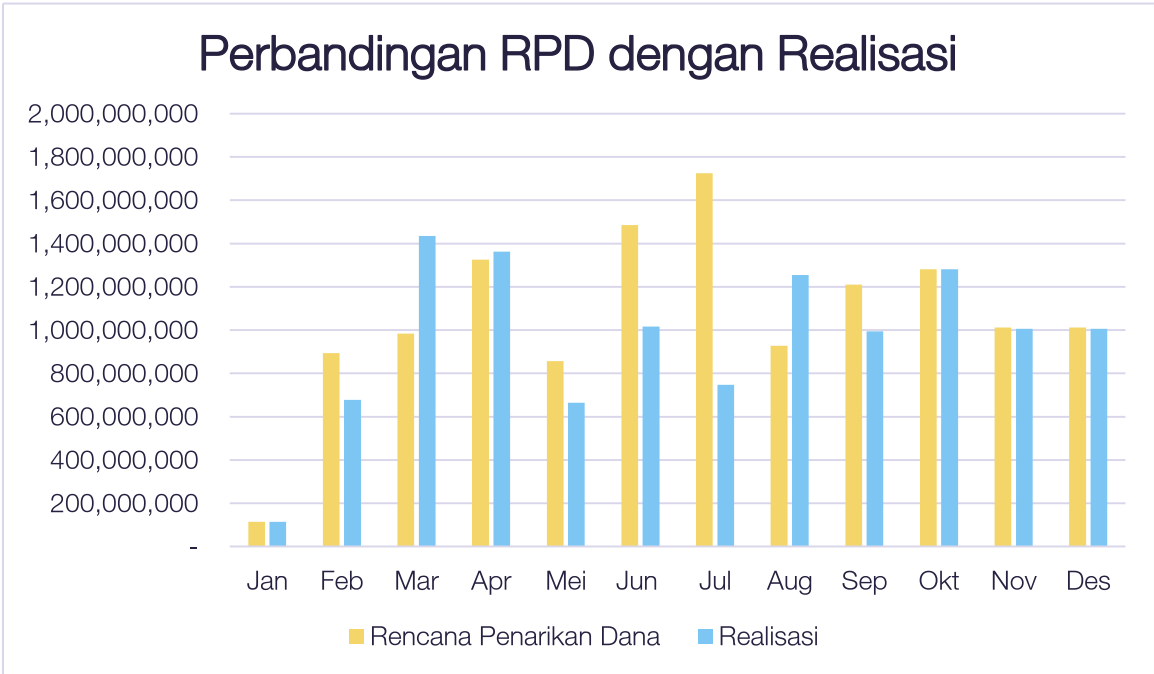
Item	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Target	0.00	10.00	15.00	20.00	30.00	35.00	4.00	45.00	50.00	60.00	70.00	87.00
Capaian	42.16	54.80	59.46	57.41	64.98	61.61	72.23	74.06	81.61	83.41	89.43	89.02

Nilai total dari Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI pada data omspan adalah 94,61. Sedangkan nilai SMART pada bulan Desember 2023 adalah sebesar 85,29. Sehingga capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas II Padang pada tahun 2023 adalah sebesar 89,02 dari target 87. Persentase capaian tersebut adalah 102,33%.



IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Dari 8 (delapan) indikator pelaksanaan anggaran, salah satu indikator yaitu deviasi halaman III DIPA mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, yaitu 7,33 dari target 10. Berikut ini adalah hasil perbandingan RPD dengan realisasi anggaran :



Dari grafik tersebut dapat dilihat terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara RPD dengan realisasi terutama pada bulan Februari, Juni, Juli, dan Agustus. Hal ini menggambarkan masih terdapat perencanaan program yang belum matang, sehingga pelaksanaan masih belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Hal ini menjadi catatan untuk perbaikan selanjutnya agar nilai deviasi halaman III DIPA dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan nilai IKPA dapat lebih baik.

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas II Padang adalah sebesar 89,03. Pada tahun 2023 dilakukan beberapa perbaikan agar target Indikator Nilai Kinerja Anggaran berhasil tercapai diantaranya:

1. Melakukan rapat evaluasi untuk mengevaluasi kesesuaian rencana dengan realisasi program kerja untuk kemudian disesuaikan Rencana Penarikan Dana;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dengan melakukan revisi anggaran;
3. Meminimalisir pelaksanaan revisi DIPA;
4. Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Indikator	2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran	86	83,65	87	89,03	87	89,02

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

1. Berorientasi Pelayanan, dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari rupiah murni dan PNPB dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga output yang didapatkan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku;
3. Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
4. Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
5. Loyal, memanfaatkan anggaran yang disediakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara;
6. Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
7. Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholder) dalam pengelolaan anggaran negara.

VII. Efisiensi

Capaian target pada Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam hal efisiensi kegiatan konsultasi dan pembahasan nilai kinerja anggaran dilaksanakan secara hybrid untuk efisiensi waktu dan dan anggaran.

IKSK-2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

I. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan factor pengurang. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan Keputusan. Kemkominfo telah mendapatkan predikat opini WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut mulai tahun 2016 s.d 2021 namun pada Tahun 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan kualifikasi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang memerlukan

penyelesaian. Opini WDP yang diterima Kemkominfo tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2022 Nomor 119.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dan harus diantisipasi dengan cara peningkatan nilai kualitas Laporan Keuangan mulai dari Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

II. Sasaran Kegiatan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI memiliki target sebesar 80%. Teknik dan Indikator Penilaian yang digunakan sebagai berikut:

1. Skala penilaian adalah 100 yang dikurangkan dengan factor pengurang indikator penilaian.
2. Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I:

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I	Metode Penilaian		
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang
1	Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK	50%		
	1) Tidak ada temuan		0%	0
	2) Jumlah temuan 1		-20%	-10
	3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15
	4) Jumlah temuan lebih dari 3		-50%	-25
2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Eselon I/Kem	50%		
	1) Nilai 100		0%	0
	2) Nilai 90 - 99		-20%	-10
	3) Nilai 80 - 89		-30%	-15
	4) Nilai dibawah 80		-50%	-25

3. Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Satuan Kerja:

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja	Metode Penilaian		
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%	100	100
	1) Tidak ada transaksi koreksi audit		0%	0
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 1 s.d. 5		-5%	-2.5
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-10%	-5
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d. 15		-15%	-7.5
	5) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-20%	-10
	6) Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25
2	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal/Barang	20%		
	1) Tidak ada kesalahan penggunaan akun		0%	0
	2) Kesalahan akun Rp1jt – Rp100jt		-5%	-1
	3) Kesalahan akun di atas Rp100jt – Rp250jt		-10%	-2
	4) Kesalahan akun di atas Rp250jt – Rp500jt		-15%	-3
	5) Kesalahan akun di atas Rp500jt – Rp1Miliar		-20%	-4
	6) Kesalahan akun di atas Rp1Miliar		-50%	-10
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%		
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-10
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%		
	1) Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%		
	1) Efektif		0%	0
	2) Efektif dengan Pengecualian		-30%	-3
	3) Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%		
	1) Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5
	Nilai akhir			

Penilaian atas Indikator "Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan" dilaksanakan oleh Biro Keuangan Hasil Penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan Kerja	Metode Penilaian																
		Bobot	Faktor Pengurang	Nilai Pengurang	Skor SDPPI	BPPTT	Balmon Jakarta	Balmon Bandung	Balmon Semarang	Balmon Yogyakarta	Balmon Surabaya	Balmon Banda Aceh	Balmon Medan	Balmon Padang	Balmon Pekanbaru	Balmon Jambi	Balmon Palembang	Balmon Lampung
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1) Tidak ada transaksi koreksi audit		0%	0%	0		0				0	0		0		0		0
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 1 s.d. 5		-5%	-5%	-5			-2,5	-2,5	-2,5			-2,5			-2,5		
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-10%	-5%	-5													
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d. 15		-15%	-9%	-9			-7,5	-7,5	-7,5								
	5) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-20%	-10%	-10													
	6) Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25%	-25													
2	Kesalahan penggunaan akun Belanja	20%																
	1) Tidak ada kesalahan penggunaan akun		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Kesalahan akun Rp12 – Rp100		-5%	-3%	-3													
	3) Kesalahan akun di atas Rp100 – Rp250		-10%	-3%	-3													
	4) Kesalahan akun di atas Rp250 – Rp500		-15%	-3%	-3													
	5) Kesalahan akun di atas Rp500 – Rp1Miliar		-20%	-4%	-4													
	6) Kesalahan akun di atas Rp1Miliar		-50%	-10%	-10	-10												
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	10%																
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-10%	-10													
4	Kelengkapan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%																
	1) Sesuai/belum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5													
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	10%																
	1) Efektif		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Efektif dengan Pengecualian		-30%	-3%	-3													
	3) Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7%	-7													
6	Kelengkapan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%																
	1) Sesuai/belum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5													
Nilai akhir					82,5	100	97,5	97,5	97,5	97,5	100	100	97,5	100	97,5	100	100	100

III. Capaian Target

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	100	125%

IV. Inovasi /Analisa keberhasilan/ ketidaktercapaian

Sebuah laporan keuangan yang berkualitas artinya harus memenuhi unsur-unsur atau karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya dalam memperoleh keandalan serta meningkatkan akurasi dan validitas data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai Upaya dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Ditjen SDPPI antara lain:

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi terbagi atas:

a. Rekonsiliasi Internal

- " Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara;
- " Rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKPB;
- " Rekonsiliasi UAKPA dengan Pengelola Piutang

b. Rekonsiliasi Eksternal

- " Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan KPPN selaku UAKBUN;
- " Pelaksanaan rekonsiliasi secara otomatis sesuai dengan ketentuan OLAP.

2. Pemanfaatan Menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada MonSAKTI
3. Telaah Laporan Keuangan mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP LKKL 2022 Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

V. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Hasil penilaian kualitas laporan keuangan pada tahun 2022 pada Ditjen SDPPI terdapat pengurangan penilaian nilai kualitas laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan:

1. Jumlah transaksi koreksi audited; Jumlah ini merupakan jurnal koreksi atas penghitungan penyisihan piutang dan penatausahaan BMN
2. Kesalahan penggunaan akun belanja
3. Perencanaan pengadaan tidak memadai.
4. Kelebihan pembayaran pekerjaan.
5. Pelaksanaan pengadaan belum seluruhnya sesuai ketentuan.
6. Penyusunan HPS dan Dokumen Pemilihan belum memadai.

Terkait hal tersebut diatas perlu adanya perbaikan dengan cara melakukan koordinasi, evaluasi dan pemantauan secara rutin terhadap Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III dan Semester II agar pada saat BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional serta Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disajikan telah sesuai dengan Standari Akuntansi Pemerintah dan disajikan secara wajar.

VI. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI pada tahun 2023 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

1. Berorientasi Pelayanan, dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari rupiah murni dan PNBPN dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga output yang didapatkan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Akuntabel, ditunjukkan dengan komitmen untuk bekerja secara jujur dan transparan sesuai dengan aturan dan

SOP yang berlaku;

- Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, FGD, dan webinar terkait dengan bidang tugasnya;
- Harmonis, didukung dengan harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman dan kondusif;
- Loyal, memanfaatkan anggaran yang disediakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara;
- Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta dinamika yang terjadi di lapangan;
- Kolaboratif, ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholder) dalam pengelolaan anggaran negara.

VII. Efisiensi

Capaian target pada Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam hal efisiensi kegiatan konsultasi dan pembahasan nilai kinerja anggaran dilaksanakan secara hybrid untuk efisiensi waktu dan anggaran.

KINERJA
LAINNYA

PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

Pada tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang menyusun rencana program kerja tahunan dengan pagu awal DIPA sebesar Rp. 12.217.843.000,-. Rincian pagu tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Pagu
1	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	1 Layanan	4.188.495.000
2	Pemantauan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota	7 Layanan	31.675.000
3	Pemantauan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota	14 Layanan	280.280.000
4	Pemantauan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Transportasi Laut	1 Layanan	36.100.000
5	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota	2 Layanan	19.810.000
6	Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota	3 Layanan	100.323.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Pagu
7	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	6 Layanan	27.780.000
8	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	11 Layanan	226.600.000
9	Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	1 Layanan	38.100.000
10	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.550.000
11	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.010.000
12	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	81.255.000
13	Gaji dan Tunjangan UPT	1 Layanan	3.505.049.000
14	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPT	1 Layanan	2.557.405.000
15	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1.100.411.000

KEUANGAN

Pagu anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Padang tahun 2023 sesuai dengan SP DIPA- 059.03.2.654094/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp. 12.406.743.000,- terdiri dari Rupiah Murni Rp. 5.410.329.000,- dan PNPB sebesar Rp. 6.996.414.000,-. Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2023 mengalami beberapa kali revisi sehingga pagu menjadi Rp. 12.217.843.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 5.058.429.000,- dan PNPB sebesar Rp 7.159.414.000,-. Perubahan pagu tersebut diakibatkan penghapusan pagu yang diblokir sebesar Rp. 300.000.000,-, penambahan anggaran dari Pusat untuk pemeliharaan perangkat transportable sebesar Rp.163.000.000,- serta pengurangan pagu dari Pusat sebesar Rp. Rp.51.900.000,-.

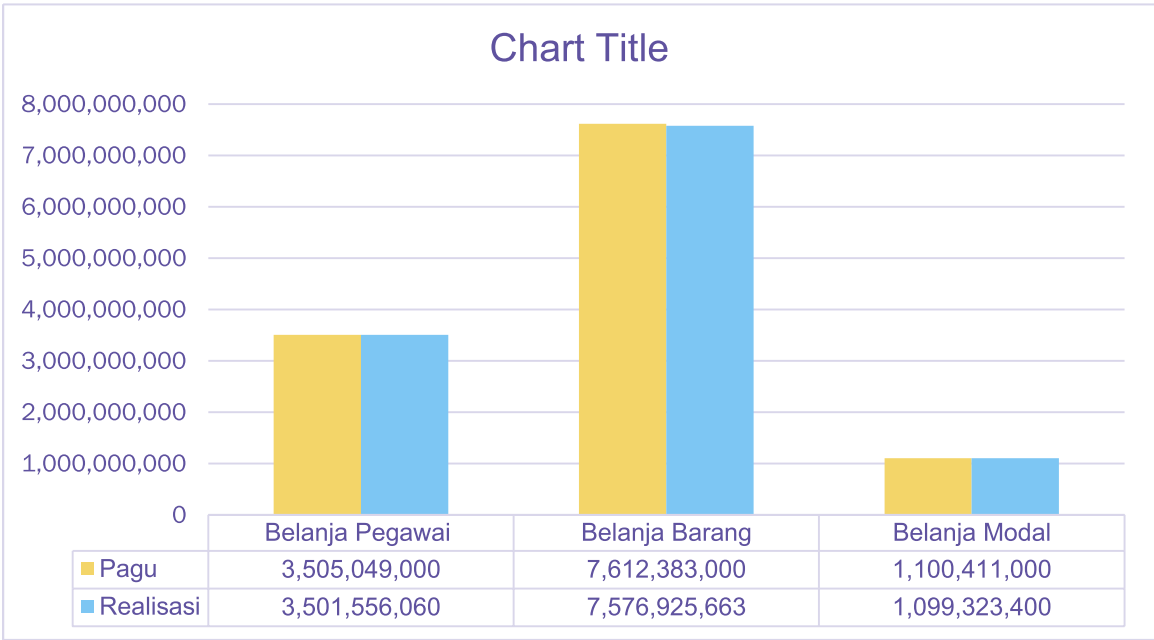
Adapun revisi anggaran yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Padang sebagai berikut :

1. Revisi I tanggal 28 Desember 2022 merupakan revisi DJA berupa Automatic Adjustment senilai Rp.300.000.000,- nilai pagu Rp. 12.406.743.000,-
2. Revisi II tanggal 13 Februari 2023 merupakan revisi administrasi berupa Perubahan Halaman III DIPA nilai pagu Rp. 12.406.743.000,-.
3. Revisi III tanggal 13 April 2023 merupakan revisi administrasi berupa Perubahan Halaman III DIPA nilai pagu Rp. 12.406.743.000,-.
4. Revisi IV tanggal 27 Juli 2023 merupakan revisi administrasi berupa pemotongan Automatic Adjustment senilai Rp.300.000.000,- , penambahan anggaran untuk pemeliharaan perangkat Transportable senilai Rp.163.000.000,- dan penurunan volume RO layanan sarana internal dari 40 unit menjadi 10 Unit
5. Revisi V tanggal 18 Agustus 2023 merupakan revisi pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional
6. Revisi VI tanggal 3 Oktober 2023 merupakan revisi pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional dan Perubahan Halaman III DIPA
7. Revisi VII tanggal 4 November 2023 merupakan revisi DJA berupa pergeseran belanja pegawai ke Instansi Pusat senilai Rp.51.900.000,- .

8. Revisi VIII tanggal 10 November 2023 revisi pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional.

9. Revisi IX tanggal 4 Desember 2023 revisi pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 12.177.805.123,- dengan persentase 99,67% dengan rincian dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Perbandingan realisasi anggaran tahun 2020-2023

Realisasi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase	98,26%	98,52%	99,24%	99,67%

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut outputnya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OUTPUT

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	4.188.495.000	4.180.188.139	99,80 %
2	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	31.675.000	31.493.000	99,43 %
3	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	280.280.000	279.933.600	99,88 %
4	Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Transportasi Laut	36.100.000	36.100.000	100 %
5	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota	19.810.000	19.794.000	99,92%

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
6	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota	100.323.000	97.353.500	97,04 %
7	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	27.780.000	27.747.900	99,88 %
8	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	226.600.000	226.332.100	99,88 %
9	Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Laut	38.100.000	38.100.000	100 %
10	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	4.550.000	4.250.000	93,41 %
11	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	20.010.000	19.962.400	99,76 %
12	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	81.255.000	81.235.000	99,98 %
13	Layanan Perkantoran	6.062.454.000	6.035.992.084	99,56 %
14	Layanan Sarana Internal	1.100.411.000	1.099.323.400	99,90 %
TOTAL		12.217.843.000	12.177.805.123	99,67 %

PENGELOLAAN BMN

Nilai BMN pada Neraca yang disajikan pada Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 33.278.215.789,-. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan pengurangan nilai BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

No	Uraian	Jumlah
1	Barang Konsumsi	34,692,049
2	Tanah	8.212.342.000
3	Peralatan dan Mesin	27,668,489,036
4	Gedung dan Bangunan	14,949,501,488
5	Irigasi	36.364.000
6	Aset Tetap Lainnya	14.278.600
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17,344,993,393)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,157,371,206)
9	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(8,441,641)
10	Software	2,793,364,179
11	Lisensi	50.128.570
12	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	30,490,000
13	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	(24,749,000)

No	Uraian	Jumlah
14	Akumulasi Amortisasi Software	(1,925,750,323)
15	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(50,128,570)
TOTAL		33,278,215,789

Daftar Barang Milik Negara Tahun 2023

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M	144	1		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M	996	1		
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M	1.257	1		
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M	4.000	1		
5	Stationary Generating Set	Unit	1		1	
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	5		
7	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	Unit	1	1		
8	Scooter	Unit	4	4		
9	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	Unit	3	2	1	
10	Battery Charge	Buah	6	4		2
11	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	Buah	1	1		
12	Spektrum Analyzer	Buah	4	4		
13	SWR Meter	Buah	1	1		
14	Global Positioning System	Buah	3	3		
15	R.F Signal Generator	Buah	1	1		
16	Log Periodic Antenna	Buah	1	1		
17	TV Analyzer	Buah	2	2		
18	Scanner (universal Tester)	Buah	1	1		
19	Fieldstrength Meter	Buah	1	1		
20	Lemari Penyimpan	Buah	1	1		
21	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	1		
22	Lemari Besi/metal	Buah	18	15	3	
23	Lemari Kayu	Buah	16	16		
24	Filing Cabinet Besi	Buah	14	10	4	
25	Brandkas	Buah	3	2	1	
26	Lemari Display	Buah	4	4		
27	Tabung Pemadam Api	Buah	13	13		
28	CCTV - Camera Control Television System	Buah	9	9		
29	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	2		
30	Mesin Absensi	Buah	1	1		
31	Overhead Projector	Buah	1	1		
32	White Board Electronic	Buah	1	1		
33	Penangkal Petir	Buah	1	1		
34	Panic Button System. Alarm Indicator	Buah	2			2
35	Alat Kantor Lainnya	Buah	1	1		
36	Meja Kerja Besi/metal	Buah	12	12		
37	Meja Kerja Kayu	Buah	47	47		
38	Kursi Besi/metal	Buah	149	146	3	
39	Kursi Kayu	Buah	4	4		
40	Sice	Buah	1	1		
41	Bangku Panjang Besi/metal	Buah	4	3	1	
42	Meja Rapat	Buah	3	3		
43	Tempat Tidur Kayu	Buah	4	4		
44	Meja Resepsionis	Buah	2	2		
45	Meja Makan Besi	Buah	6	6		

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
46	Meja Makan Kayu	Buah	3	3		
47	Partisi	Buah	3	3		
48	Backdrop TV/Wardrobe	Unit	1	1		
49	Sofa	Unit	3	3		
50	Meubelair Lainnya	Dummy	1	1		
51	Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner	Buah	2	2		
52	Mesin Cuci	Buah	1	1		
53	Lemari Es	Buah	2	2		
54	A.C. Sentral	Buah	18	17	1	
55	A.C. Split	Buah	9	9		
56	Kitchen Set	Unit	1	1		
57	Televisi	Buah	8	7		1
58	Sound System	Buah	3	3		
59	Mic Conference	Unit	1	1		
60	Unit Power Supply	Buah	8	8		
61	Stabilisator	Buah	1	1		
62	Dispenser	Buah	6	6		
63	Coffee Maker	Buah	1	1		
64	Handy Cam	Buah	1	1		
65	Vertikal Blind	Buah	1	1		
66	Gordyin/kray	Buah	1	1		
67	Tangga	Buah	1	1		
68	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	1		
69	Neon Box	Buah	1	1		
70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	4	4		
71	Battery Charger (peralatan Studio Audio)	Buah	2	2		
72	Receiver HF/LF	Buah	1	1		
73	Digital Audio Taperecorder	Buah	1	1		
74	Cable	Buah	5	5		
75	Analog/Digital Receiver	Buah	2	2		
76	Tripod Camera	Buah	2	2		
77	DC Converter	Buah	4	4		
78	Camera Digital	Buah	1	1		
79	LCD Monitor	Buah	1	1		
80	Camera Conference	Buah	1	1		
81	Drone	Buah	1	1		
82	Video Wall	Unit	1	1		
83	GPS Receiver	Buah	1	1		
84	Telephone (pabx)	Buah	1		1	
85	Telephone Mobile	Buah	2	2		
86	Unit Tranceiver Ssb Portable	Buah	1	1		
87	Unit Tranceiver VHF Portable	Buah	23	23		
88	Unit Tranceiver VHF Transportable	Buah	1			1
89	Unit Tranceiver VHF Stationary	Buah	2	2		
90	Unit Tranceiver UHF Portable	Buah	6	6		
91	Alat DF Radio VHF	Buah	1	1		
92	Antene HF/SW Stationary	Buah	1	1		
93	Antene VHF/FM Portable	Buah	1	1		
94	Antene VHF/FM Transportable	Buah	1	1		
95	Peralatan Antena VHF/FM Lainnya	Buah	3	3		
96	Antene UHF Portable	Buah	1	1		
97	Antene UHF Transportable	Buah	1	1		
98	Peralatan Antena UHF Lainnya	Buah	1	1		
99	Antene SHF Portable	Buah	3	3		

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
100	Antena All Band	Buah	4	4		
101	Translator VHF/VHF Portable	Buah	1	1		
102	Mast Tower	Buah	4	4		
103	All Band Receiver	Buah	6	6		
104	Rig Dual Band	Buah	1	1		
105	Peralatan Antena Penerima HF	Buah	1	1		
106	Peralatan Antena Pemancar MF+HF Portable	Buah	1	1		
107	Radio Direction Finder	Buah	1	1		
108	Portable Digital Direction Finder	Unit	1	1		
109	Low Noise Amplifier SHF	Unit	2	2		
110	Unit Antena Transceiver VHF Stationary	Buah	2	2		
111	Conecctor	Buah	3	3		
112	Genset	Buah	2	1	1	
113	Tabung O2	Buah	1	1		
114	Car Compass	Buah	1	1		
115	Refrigerator	Buah	1	1		
116	Rotator	Buah	1	1		
117	Carrying/storage Case	Buah	1	1		
118	Antenna Tuning Unit	Buah	2	2		
119	Manual Screen	Buah	1	1		
120	Interface	Buah	2	2		
121	Pre Amp Field Meas	Buah	1	1		
122	Tenda Pleton (Alat Keamanan)	Buah	4	4		
123	Local Area Network (LAN)	Buah	2	2		
124	P.C Unit	Buah	13	13		
125	Laptop	Buah	28	28		
126	Note Book	Buah	2	2		
127	Hard Disk	Buah	1	1		
128	Printer (peralatan Personal Komputer)	Buah	15	15		
129	Scanner (peralatan Personal Komputer)	Buah	4	4		
130	Router	Buah	3	3		
131	Modem	Buah	1	1		
132	Rak Server	Buah	3	3		
133	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	1	1	
134	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1		1	
135	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	1		
136	Gedung Garasi/pool Permanen	Unit	1	1		
137	Gedung Garasi/pool Semi Permanen	Unit	1		1	
138	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1		
139	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Unit	1	1		
140	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1	1		
141	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	3	3		
142	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	2	2		
143	Bangunan Menara Radio	Unit	2	2		
144	Pagar Permanen	Unit	3	3		
145	Bangunan Menara/bak Penampung/reservoir Air Minum	Unit	1		1	
146	Lukisan Kanvas	Buah	4	4		
147	Lukisan Batu, Keramik, Kayu, dll	Buah	6	6		
148	Software Komputer	Dummy	6	6		
149	Lisensi	Dummy	1	1		

PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN UPT

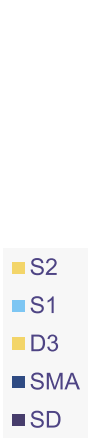
Pada awal tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Padang memiliki sumber daya manusia sejumlah 26 (dua puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat mutasi 1 orang pegawai atas nama Kusmono per 1 juni 2023. Pegawai yang pensiun terdapat 2 orang atas nama Marlis TMT 1 Juni 2023 dan Zulhairi TMT 1 November 2023. Sehingga total pegawai pada bulan Desember 2023 adalah sebanyak 23 orang PNS.

Data PNS Balmon SFR Kelas II Padang per 31 Desember 2023

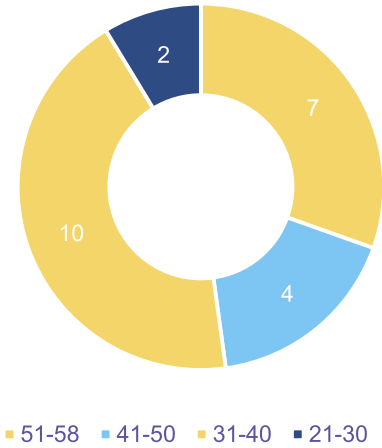
No	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1	Helmi. ST. MM	19700726 199003 1 001	IV/a	Kepala Balmon
2	Tojo Imanto. S.Kom. MH	19850204 200803 1 003	III/d	Kasubag TU & RT
3	Syamsuddin. S.IP. MM	19691101 199003 1 002	III/d	Pengendali Ahli Muda
	Kusmono. ST	19700411 199903 1 001	III/d	Mutasi Juni 2023
	Zulhairi. SH	19651008 198703 1 002	III/d	Pensiun November 2023
4	Yufri Alharis. S.Sos	19660927 199303 1 003	III/d	Analisis sumber daya monitoring Level 2
5	Adrisoni	19681001 198903 1 002	III/d	Pengendali Penyelia
6	Elinurfemi. SE	19691027 199003 2 001	III/d	Pengelola Data Operasi dan Pelayanan
7	Erlisnawati. ST. SH	19750801 200604 2 006	III/d	Pengendali Ahli Muda
8	Siska Destalia Syahrias. ST	19841216 200901 2 005	III/d	Pengendali Ahli Muda
	Suherdman. SH	19670512 199012 1 001	III/c	Meninggal Mei 2022
9	Hendry Junaidi. SH..MH	19860418 200502 1 001	III/c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda
10	Intan Merina. S. IP	19880817 201101 2 013	III/c	Analisis sumber daya monitoring Level 3
11	Kosar Manurung. S.Kom	19820412 200803 1 001	III/c	Pengendali Ahli Muda
12	Gazali Syam. A.Md	19820428 200502 1 001	III/c	Pengendali Penyelia
	Marlis	19650531 199003 2 001	III/b	Pensiun Juni 2023
	Khaisal	19640503 199003 1 005	III/b	Pensiun Juni 2022
13	Nasrullah. SE	19850815 200912 1 003	III/c	Analisis sumber daya monitoring Level 2
14	Martina Heppy Hutapea. ST	19840329 200803 2 001	III/c	Pengendali Pertama
15	Firdaus	19661122 198903 1 001	III/a	Pengendali Pertama
16	Popi Sandora. SE	19810806 200912 2 001	III/a	Analisis sumber daya monitoring Level 2
17	Elmira Puspa Sari. ST	19910904 201902 2 005	III/b	Pengendali Pertama
18	Wiyono	19830616 200604 1 002	III/a	Analisis sumber daya monitoring Level 2
19	Muchlis	19691122 198903 1 002	III/a	Analisis sumber daya monitoring Level 2
20	M. Ilham. Z.. A.Md	19950816 201902 1 001	II/c	Pengendali Pertama

No	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jabatan
21	Darmil	19830815 200701 1 002	II/b	Analisis sumber daya monitoring Level 2
22	Gusrian Antoni	19850813 200912 1 002	II/b	Pengendali Pelaksana
23	Riana Syafriyanti. A.MD.T.	20000427 202303 2 001	II/c	Pengelola Manajemen Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Informatika

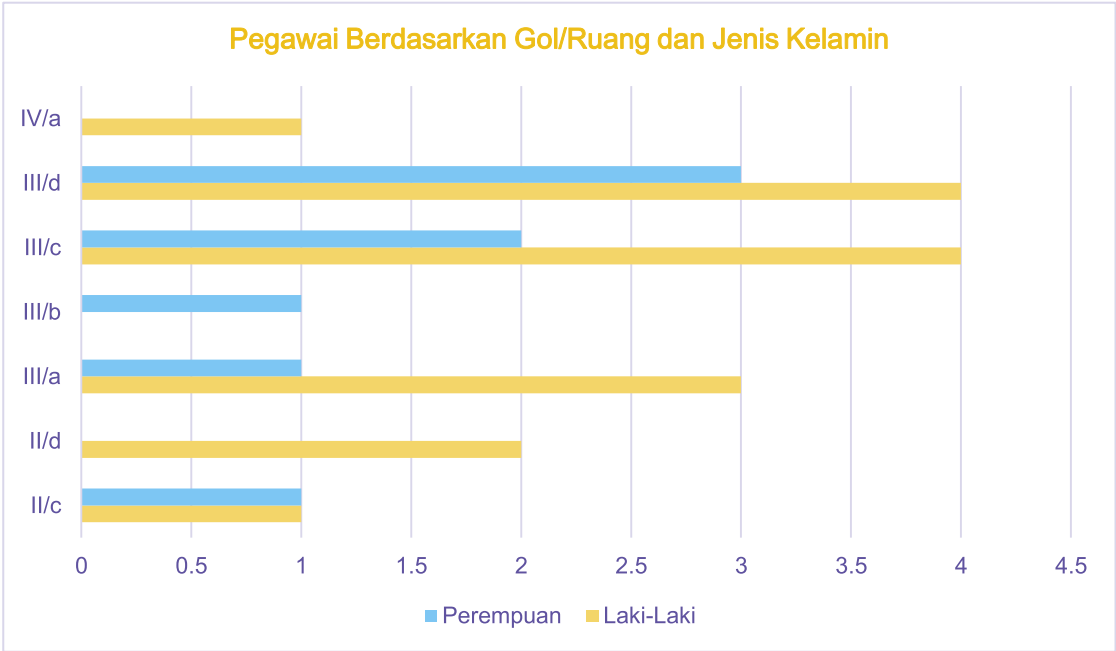
Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Pegawai Berdasarkan Usia



Pegawai Berdasarkan Gol/Ruang dan Jenis Kelamin





BAB IV PENUTUP

Bab IV Penutup

Sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang. Program kerja Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. namun masih perlu adanya peningkatan dimasa yang akan datang sehingga mempunyai perencanaan dan realisasi yang lebih baik lagi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan banyaknya perangkat informatikan yang beredar. menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang tahun 2023 telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang mendukung Kinerja Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi, Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Pelayanan Publik Maritim Nelayan (MOTS) dan Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang berhasil mencapai semua indikator kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang ini dibuat sebagai evaluasi kinerja dan sebagai indikator dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang. Pada Laporan Kinerja ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan Laporan Kinerja ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada. dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



KALEIDOSKOP BALMON SFR KELAS II PADANG TAHUN 2023

Balai Monitoring
Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang

Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Memperingati HUT RI ke 78



Kegiatan Memperingati Hari Bhakti POSTEL ke 78



Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Memperingati Hari Bhakti POSTEL ke 78



Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Memperingati Hari Bhakti POSTEL ke 78



Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Kinerja Balmon Padang



Bimtek Manajemen Resiko , WBS , dan Benturan Kepentingan dalam rangka meningkatkan Pembangunan Zona Integritas

Dokumentasi Kegiatan



Bimtek Manajemen Resiko , WBS , dan Benturan Kepentingan dalam rangka meningkatkan Pembangunan Zona Integritas

Kegiatan Evaluasi Kinerja Balmon Padang



Dokumentasi Kegiatan

Sosialisasi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio



Sosialisasi Maritim On The Spot (MOTS)



Dokumentasi Kegiatan

Pelaksanaan UNAR



Kegiatan Penertiban BWA



Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Penertiban BWA



Pengukuran Radio Spektrum Frekuensi



Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi Kegiatan

Pengukuran Radio Spektrum Frekuensi



Tibnas



Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi Kegiatan





**Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Padang**

